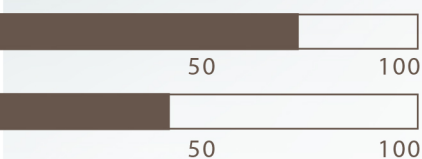
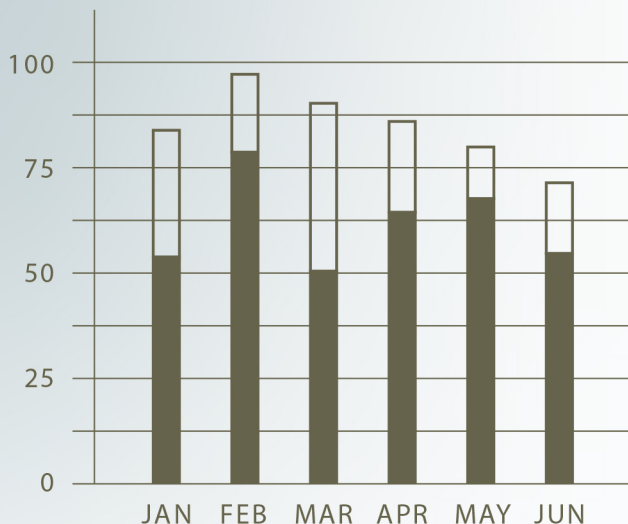


LAPORAN AKHIR

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Indikator Keluaran, Volume dan Manfaat.....	7
1.4 Dasar Hukum.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2 Inflasi	16
2.2.1 Konsep teori inflasi	17
2.3 Ketenagakerjaan.....	18
2.3.1 Pengertian ketenagakerjaan.....	18
2.3.2 Teori ketenagakerjaan.....	19
2.4 Kemiskinan	20
2.4.1 Pengertian Kemiskinan.....	20
2.4.2 Teori kemiskinan	20
2.4.3 Penyebab Kemiskinan.....	22
2.5 Keuangan Daerah.....	23
2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah	23
2.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.5.3 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	31

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

BAB III METODOLOGI	35
3.1 Metode Penelitian	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data	35
3.3 Sampel Penelitian	35
3.4 Jenis Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	37
4.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	37
4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	42
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	47
4.1.3 Inflasi	47
4.1.4 Kemiskinan	48
4.1.5 Pengangguran	49
4.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	49
4.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah (2022-2023)	51
4.2.2 Dana Perimbangan	58
4.2.3 Proyeksi Belanja Daerah (2022-2023)	63
4.2.4 Anggaran Program Tematik Prioritas Pembangunan Tahun 2023	64
4.2.5 Neraca Daerah (2022-2023)	66
4.2.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah	76
4.2.7 Peta Resiko Keuangan Daerah	79
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen), 2010-2021	5
Tabel 2. 1	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	33
Tabel 2. 2	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah	34
Tabel 4.1	Target Perekonomian Makro Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023....	41
Tabel 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023	42
Tabel 4.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023 (Dalam Juta Rupiah)	45
Tabel 4.4	Pembagian Dividen atas Penyertaan Modal pada Swasta (Lembaga Keuangan) Kabupaten Bangka tengah, 2012-2021	57
Tabel 4.5	Realisasi, Proyeksi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2020-2023.....	64
Tabel 4.6	Anggaran Program Prioritas Kabupaten Bangka Tengah, 2023	65
Tabel 4.7	Nilai dan Pertumbuhan Total Aset Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021	66
Tabel 4.8	Nilai dan Pertumbuhan Aset Lancar Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021	67
Tabel 4. 9	Nilai dan Pertumbuhan Aset Tetap Kabupaten Bangka Tengah, 2016 - 2021	67
Tabel 4. 10	Nilai dan Pertumbuhan Aset Lainnya Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021	68
Tabel 4.11	Nilai dan Pertumbuhan Piutang Pajak Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021	68

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Tabel 4.12	Nilai dan Pertumbuhan Piutang Retribusi Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021	69
Tabel 4.13	Nilai dan Pertumbuhan Kewajiban Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021... ..	70
Tabel 4.14	Nilai dan Pertumbuhan Ekuitas Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021	70
Tabel 4.15	Neraca Kabupaten Bangka Tengah periode 2015-2021	71
Tabel 4.16	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023.....	76
Tabel 4.17	Rasio Kemandiran Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023	78
Tabel 4.18	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Lingkaran Kemiskinan Nurkse	22
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023.....	47
Gambar 4.2	Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023	48
Gambar 4.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023	48
Gambar 4.4	Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023	49
Gambar 4.5	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012- 2023.....	52
Gambar 4.6	Realisasi, Proyeksi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 - 2023 Kabupaten Bangka Tengah	53
Gambar 4.7	Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023 ...	54
Gambar 4.8	Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012- 2023.....	54
Gambar 4.9	Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Bangka Tengah, 2012 - 2023	56
Gambar 4.10	Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023.....	56
Gambar 4.11	Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023.....	59
Gambar 4.12	Realisasi dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023	60
Gambar 4.13	Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023.....	61
Gambar 4.14	Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023.....	62

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Gambar 4.15 Realisasi, Proyeksi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023.....	63
Gambar 4.16 Peta Risiko Penerimaan Pajak Daerah	81
Gambar 4.17 Peta Risiko Belanja Daerah.....	83



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu karena hanya dengan kasih sayang serta pertolongan-Nya, Laporan Akhir Kajian **Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2023** dapat diselesaikan. Laporan akhir kajian ini terdiri dari 5 (Lima) bagian yaitu: Pendahuluan, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Kesimpulan dan Rekomendasi.

Tujuan Pekerjaan Penyusunan Analisis Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022 dan 2023 diantaranya untuk Mengetahui dan menganalisis kondisi ekonomi 2022 dan 2023 yang mencakup indikator makro ekonomi; Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Bangka Tengah 2022 dan 2023 dan analisis asumsi yang digunakan (nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan dan kemiskinan); Mengetahui dan menganalisis perbandingan nilai proyeksi dan target indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023; Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi kontribusi PDRB per sub sektor terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah dan pertumbuhannya tahun 2022 dan 2023 dan Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Tengah terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pertumbuhannya tahun 2022 dan 2023.

Tim Peneliti menyadari laporan akhir ini masih teramat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan dalam kegiatan ini sangat penulis harapkan sehingga dapat menjadi pengayaan bagi kajian berikutnya.

Bangka, Oktober 2022
Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan pembangunan tersebut tentunya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan indikator keberhasilan salah satunya adalah ditunjukkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu arah dari perencanaan yang tersusun dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah juga wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan RKPD tersebut dibutuhkan analisis Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah. Penjabaran setiap

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

tahun dari KEM tersebut dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Daerah (KED) yang dikaji dan dianalisis setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Bangka Tengah tentunya suatu kewajiban untuk melakukan analisis dari Kerangka Ekonomi Daerah (KED) ini. Analisis KED tahun 2022-2023 ini diharapkan akan memberikan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah dan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026.

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268). Wilayah Administratif pada awal pembentukan Kabupaten Bangka tengah terdiri dari : 4 Kecamatan, 1 Kelurahan, 39 Desa dan 74 Dusun. Kemudian pada tahun 2006 dibentuk 2 kecamatan baru, 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Nomor 26). Pada tahun 2014 Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 Kecamatan, 56 Desa dan 7 Kelurahan.

Luas wilayah \pm 227.911,00 Ha atau 2.279,11 Km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 196.196 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan, terdapat 2 kecamatan yang tidak berbatasan dengan laut yaitu Kecamatan simpang Katis dan Namang, dan 20 desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut, (sumber dari BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019).

Prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 memperhatikan pendekatan substantif secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi terus dikembangkan secara terpadu terintegrasi dengan percepatan pengembangan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam antara lain: sektor pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pariwisata/ekonomi kreatif, dan pemasaran/perindagkop UKM.

Salah Satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah tercermin salah satunya dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 12 tahun terakhir (2010-2021) seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. Dari

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Tabel 1.1 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2021 menunjukkan perambatan setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 sebesar 4.61 persen, begitu juga dengan tahun 2014 dan 2015 juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,50 persen pada tahun 2014 dan 0,30 persen pada tahun 2015. namun pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan perbaikan dan peningkatan yaitu sebesar 4.76 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah mencapai puncak tertinggi pada tahun 2011-2012. Hal ini didorong oleh industri logam timah sebagai pengungkit perekonomian Kabupaten Bangka Tengah, dimana pada saat itu timah masih memegang peranan utama dalam perekonomian Kabupaten Bangka Tengah, Efek tersebut berlanjut pada lapangan usaha lainnya yang ikut berkembang seperti lapangan usaha Transportasi dan pergudangan dikarenakan menarik minat masyarakat dari luar Kabupaten Bangka Tengah untuk datang menjadi pekerja tambang. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya laju pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan.

Secara rinci laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah kurun waktu 2010-2021 terlihat pada **Tabel 1.1** berikut:

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen), 2010-2021

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (Persen)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.61	8.14	7.96	10.91	12.18	9.55	4.87	0.66	6.12	6.09	9.67	0.11
Pertambangan dan Penggalian	1.73	2.95	0.54	1.81	1.27	0.78	-4.1	-2.42	-3.86	5.59	-7.88	5.52
Industri Pengolahan	0.32	0.18	0.13	-12.4	-16.8	-31	2.6	6.59	-2.71	-44.9	0.98	4.59
Pengadaan Listrik dan Gas	9.72	23.56	5.72	12.1	9.99	9.73	10.76	5.67	6.8	20.05	7.81	12.5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.35	9.21	7.29	6.63	5.78	8.56	4.81	8.23	-3.79	4.17	2.63	4.43
Konstruksi	12.3	11.07	10.45	11.61	4.53	8.56	7.06	3.85	4.57	9.28	-0.29	4.27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.89	9.98	9.52	9.49	7.38	6.34	5.34	7.48	5.28	4.74	-4.1	5.39
Transportasi dan Pergudangan	11.8	12.61	9.8	9.5	-0.07	4.92	4.42	6.78	8.03	1.28	-24.5	7.16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.29	9.31	8.31	8.28	7.86	7.88	4.12	4.98	6.07	9.25	-2.05	9.92
Informasi dan Komunikasi	4.04	8.17	7.87	8.52	8.26	7.6	6.2	7.52	11.98	14.52	17.8	8.57
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.47	13.51	12.96	13.42	13.89	8.06	6	2.08	1.4	9.16	3.45	5.49
Real Estat	9.11	10.39	7.69	9.33	8.98	6.19	2.11	3.64	3.95	4.98	4.73	6.16
Jasa Perusahaan	9.93	9.82	7.54	7.91	8.21	6.97	0.22	3.31	5.19	3.98	-9.06	5.24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.25	11.4	8.26	10.22	9.93	9.98	6.01	3.84	8.78	10.95	-3.66	5.29
Jasa Pendidikan	11.9	6.66	6.78	9.89	9.42	9.06	7.7	5.16	7.26	9.39	-0.15	2.21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.62	9.65	8.47	8.72	7.24	8.79	6.42	6.88	4.34	9.81	3.46	13.17
Jasa lainnya	9.83	7.61	7.3	6.39	7.95	5.84	5.17	5.93	6.91	8.97	-2.45	2.94
Produk Domestik Regional Bruto	4.61	6.01	5.02	3.3	1.5	0.31	3.05	3.46	3.42	1.21	-2.86	4.76

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah 2022



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 ini adalah: Untuk menghasilkan Penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah lingkup bidang perekonomian dan dokumen pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan Pekerjaan Penyusunan Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023 yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis kondisi ekonomi 2022 dan 2023 yang mencakup indikator makro ekonomi;
2. Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Bangka Tengah 2022 dan 2023 dan analisis asumsi yang digunakan (nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan dan kemiskinan)
3. Mengetahui dan menganalisis perbandingan nilai proyeksi dan target indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023.
4. Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi kontribusi PDRB per sub sektor terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah dan pertumbuhannya tahun 2022 dan 2023.
5. Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Tengah terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pertumbuhannya tahun 2022 dan 2023.

1.3 Indikator Keluaran, Volume dan Manfaat

Indikator keluaran dari Penyusunan Dokumen Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 ini adalah Tersusunnya dokumen Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023 dengan volume 1 (satu) dokumen 5 (lima) Salinan terdiri dari :

- Laporan Pendahuluan/Kajian awal 1 (satu) laporan 3 (tiga) Salinan dengan isi pendahuluan dan landasan teori (*tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, kemiskinan dan keuangan daerah*)
- Dokumen Kajian Akhir 1 (satu) dokumen 5 (lima) Salinan dengan isi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta kesimpulan dan rekomendasi.

Adapun manfaat dari hasil Penyusunan Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 adalah untuk menjadi salah satu dasar rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan di Bangka Tengah.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang sebagai dasar Penyusunan Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 35. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus disease 2019 (COVID-2019) Sebagai Bencana Nasional.
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
44. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk Penyusunan Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 terdiri dari empat Bab dengan sub dari keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Indikator Keluaran, Volume dan Manfaat



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

1.4 Dasar Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.2 Inflasi

2.3 Ketenagakerjaan

2.4 Kemiskinan

2.5 Keuangan Daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Implikasi Kebijakan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (2004), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya.

Fungsi yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{P_{t-1} - P_{t-2}}{P_{t-2}} \times 100$$

Keterangan:

- Y_t = pertumbuhan ekonomi
 P = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil
 t = periode tahun

Sedangkan, Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Keterangan :

G_t : pertumbuhan ekonomi tahun t

Y_t : pendapatan nasional tahun t

Y_{t-1} : pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)

Adapun dua konsep pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis atau penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.
2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil daripada tingkat pertambahan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup aktual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan output total riil.

2.2 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan derus-menerusi. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi:

- Kenaikan Harga: Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.



- Bersifat Umum: Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.
- Berlangsung Terus-Menerus: Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan.

2.2.1 Konsep teori inflasi

A. Teori kuantitas

Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Pada dasarnya teori klasik mengatakan: “perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang. Menurut teori ini penyebab kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang mengarah pada inflasi adalah: jumlah uang beredar terlalu banyak

B. Teori Keynesian

Menurut teori ini penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup diluar batas kemampuannya. Kelompok masyarakat ini terbagi tiga kelompok, yaitu:

- Pemerintah

Apabila pemerintah mengalami defisit anggaran pemerintah dengan dibiayai dari mencetak uang baru, yang kemudian beredar dimasyarakat maka pemerintah akan menyebabkan inflasi.

- Pengusaha swasta

Pengusaha dapat menyebabkan inflasi apabila memaksakan diri investasi secara besar-besaran dan investasi itu diperoleh dari kredit bank.

- Serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila menuntut kenaikan gaji mereka diatas tingkat produktivitasnya.

Apabila ketiga kelompok tersebut bersinergi menjalankan prilakunya seperti diatas maka akan terjadi inflasi gap. Inflasi gap adalah permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat pada harga berlaku melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perekonomian.

C. Teori sktrukturalis

Teori ini mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Tidak jarang faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa inflasi tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga/moneter pemerintah itu sendiri.

2.3 Ketenagakerjaan

2.3.1 Pengertian ketenagakerjaan

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas supply tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas supply tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah keseimbangan tersebut dapat berubah lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (adanya excess supply of labour) dan, lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya excess demand of labour).

2.3.2 Teori ketenagakerjaan

- 1) Teori Lewis (1959), yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian Negara, yaitu:
 - Sektor kapitalis modern
 - Sektor subsistem
- 2) Teori Fei-Ranis (1964), yang berkaitan dengan Negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Sumber Daya Alamnya belum dapat di olah, sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurutnya ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh:
 - a. Dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output pertanian), dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
 - b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
 - c. Tahap ditandai oleh awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar dari pada perolehan upah institusional.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari sehingga dianggap kurang mampu dalam menjamin kelangsungan hidup mereka. Definisi Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa. Konsep kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan yaitu ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Sedangkan bagi dinas sosial orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

2.4.2 Teori kemiskinan

Kerentanan kemiskinan menurut Chambers disebut dengan perangkap kemiskinan (*deprivation trap*). Inti dari perangkap kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri (*Poverty*), kelemahan fisik (*physical weakness*), keterasingan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan adanya ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Chambers mengemukakan bahwa kemiskinan terjadi lebih kepada individu atau masyarakat yang disebut miskin karena tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini dapat terhindar



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

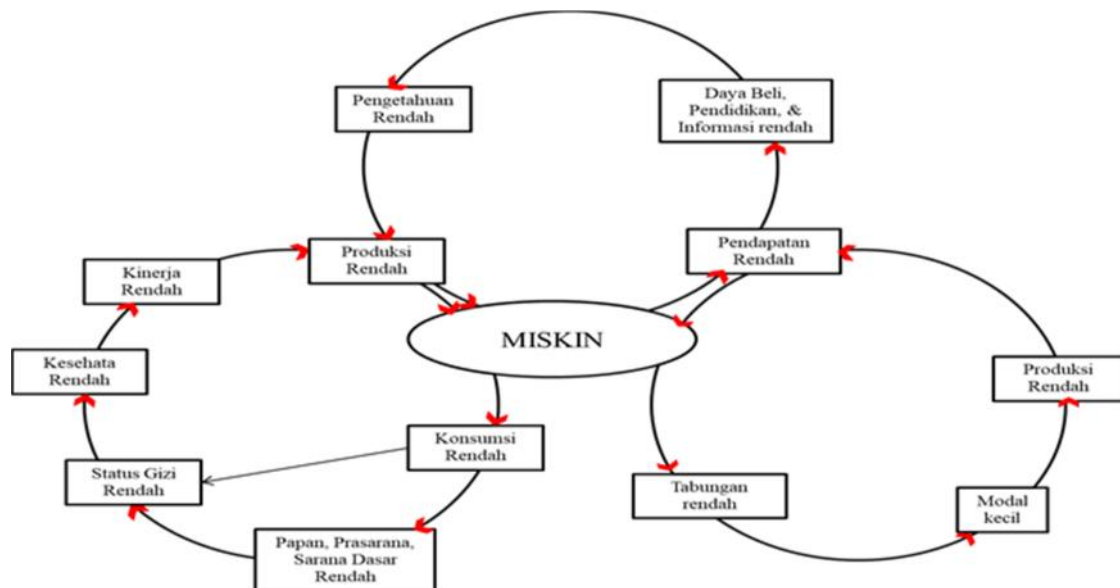
dan sangat membutuhkan alokasi pendapatan dalam penyelesaiannya. Sharp mengemukakan konsep kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.

Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*).

Ragnar Nurkse (1953), yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akanberimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023



Gambar 2. 1 Lingkaran Kemiskinan Nurkse

2.4.3 Penyebab Kemiskinan

Nasikun (2005) menjelaskan Sumber penyebab kemiskinanyaitu:

- *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi colonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
- *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, baha pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung.
- *Resaurces management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

- *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika dimusim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- *Exploatif intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong seperti rentenir.
- *Internal political fragmentation and civil stratffe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- *Interbational processe*, bekerjanya system internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara miskin.

2.5 Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu



berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- 3) Penerimaan daerah
- 4) Pengeluaran daerah
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1) Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017).

Makna dari Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Adapun sumber-sumber PAD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang



disebabkan tariff pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan. dibawa (take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan,

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.



j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ‘
Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat



d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seluruhnya memiliki kesamaan, dalam arti bahwa terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya. Sumber penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

2.5.3 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010: 142), untuk menganalisis laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisa pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatifkah. Semakin tinggi prosentase pertumbuhan pendapatan, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu.

Menurut Mahmudi (2010 hal.138) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

Pertumbuhan Pendapatan th t	= pertumbuhan pendapatan tahun berjalan
Pendapatan th t	= pendapatan tahun berjalan saat ini
Pendapatan th (t-1)	= pendapatan tahun berjalan saat ini dikurangi pertumbuhan tahun lalu.

2. Analisis Varians / Selisih Anggaran

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*). Informasi selisih anggaran sangat membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian.

Tetapi jika pendapatan tidak tercapai, hal butuh penelaah lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.

3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah		
Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Untuk menghitung Rasio kemandirian Keuangan Daerah ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

(yang dianggarkan). Rasio efektivitas pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas penerimaan PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Kategori	Predikat
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Untuk data yang bersifat kuantitatif, maka pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Jenis kajian ini menggunakan teknik survey kepada Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah dengan tujuan memperoleh penjelasan tentang kondisi dan praktek dalam kaitannya dengan penyusunan kerangka keuangan daerah berdasarkan kenyataan yang terjadi atas kebijakan yang diambil dari Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat komprehensif dengan cara Observasi, wawancara, analisis dokumenter, dan atau tes terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Sampel dalam kajian ini.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditentukan secara purposif atas pertimbangan dari Tim Peneliti. OPD yang dipilih sebagai sampel adalah OPD yang terkait dengan kajian ini, diantaranya:

- OPD yang memiliki urusan terkait pengembangan sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu: Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda di

Program Kerjasama LPPM UBB dengan Bappeda Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022



- Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Perhubungan, *Dinas* Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
- OPD lain yang mendukung program-program dari penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah, seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan pada kajian ini, yaitu:

- a. Data primer. Data ini diperoleh dari wawancara secara langsung dan melalui *Forum Group Discussion (FGD)* dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sampel dalam kajian ini.
- b. Data sekunder adalah data-data pendukung dari dokumen OPD di Kabupaten Bangka Tengah baik yang bersifat laporan, dokumen perencanaan maupun dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk dengan kajian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada kajian ini dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dimana pada analisis data yang bersifat kuantitatif adalah berdasarkan data-data yang berbentuk numerik atau angka. Umumnya, data yang diolah merupakan data besar, sehingga terkadang diperlukan penghitungan statistik untuk mempermudah penghitungan. Sedangkan untuk analisis data yang bersifat kualitatif berdasarkan hasil dari wawancara mendalam (*In-depth Interview*) untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara antara Tim Peneliti dengan OPD di Kabupaten Bangka yang dilakukan secara langsung.

BAB IV

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2021. Selanjutnya dalam Kerangka Keuangan Daerah juga dituangkan proyeksi untuk tahun 2022 dan serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan tahun 2023.

Dalam rangka proses pemulihan ekonomi dan transformasi sosial yang ditimbulkan dari efek *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* sekaligus untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dan harus diselaraskan dengan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat visi: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**. Untuk pencapaian visi tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 Misi Kabupaten Bangka Tengah yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Dalam melakukan implementasi misi tersebut, Kabupaten Bangka Tengah menjabarkan misi tersebut ke dalam 8 prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah, yakni:

1. Peningkatan Pendidikan.
2. Peningkatan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
4. Penurunan Angka Pengangguran.
5. Perlindungan Sosial.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik.
7. Pengendalian Lingkungan Hidup.
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Secara spesifik perencanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan 2023 :**“PEMULIHAN EKONOMI, PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**. Berdasarkan tema pembangunan 2023 tersebut, maka direncanakan ada 5 (lima) prioritas tematik pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2023 yaitu:

1. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Tematik: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Dalam mewujudkan tema pembangunan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif tahun 2023 dilakukan dalam bentuk program-program sebagai berikut:



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

- Meningkatkan saprodi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor unggulan lainnya.
- Kemudahan berinvestasi.
- Bantuan modal usaha.
- Pengembangan sektor IKM dan UKM melalui inovasi dan IPTEK
- Pembangunan Pasar Tani

Lokus program prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif direncanakan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki kecamatan tersebut.

2. Prioritas Pembangunan: Perlindungan Sosial

Tematik: Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Bangka Tengah diwujudkan dalam bentuk program:

- Penanggungan kemiskinan secara terpadu (LAKSO),
- Bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Lokus program prioritas Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Bangka Tengah mengacu berdasarkan update data-data dari Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial (SILAKSO).

3. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Kesehatan

Tematik: Penurunan Stunting

Penurunan stunting untuk lokus di Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan pada 13 Desa yang tersebar di 4 Kecamatan, yakni: Pangkalan Baru, Sungai Selan, Namang dan Lubuk Besar. Fokus program prioritas penurunan stunting di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2023 dilakukan dengan peningkatan pelayanan fasilitas Kesehatan dan jaminan Kesehatan masyarakat, pemenuhan SPM kesehatan.



4. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tematik: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Tengah diwujudkan melalui program reformasi birokrasi dan sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik.

5. Pengembangan Pariwisata.

Program Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka Tengah yang direncanakan lokus program pada pengembangan objek wisata Danau Pading, Danau Kaolin, Air Terjun C2, Pantai Sumur Tujuh dan Pulau Ketawai.

Berkaitan dengan penyusunan kerangka ekonomi daerah tersebut salah satunya dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2022 dan 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Selain itu, berkaitan dengan kerangka ekonomi daerah maka perlu dilakukan penyusunan proyeksi keuangan daerah tahun 2022 dan 2023 dengan mempertimbangkan tantangan dan isu strategi tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah. Adapun tantangan utama tahun 2022 dan 2023 yang dihadapi adalah terkait pemulihan pasca Pandemi Covid 19, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan. Selain itu terdapat 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi Kabupaten Bangka Tengah diantaranya:

- 1) Percepatan Pemulihan Ekonomi.
- 2) Penanggulangan Kemiskinan.
- 3) Pengurangan Angka Pengangguran.



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

- 4) Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Dasar Pendukung Ekonomi.
- 5) Peningkatan Kualitas dan Pendidikan Masyarakat.
- 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah.
- 7) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
- 8) Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 merupakan gambaran ekonomi pengambilan keputusan pada tahun 2022 dan 2023, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 dan 2023. Gambaran proyeksi tahun 2022 dan 2023 dilakukan untuk mempertimbangkan unsur faktor internal maupun eksternal yang berpotensi memiliki dampak bagi perekonomian. Target perekonomian yang ingin dicapai Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2022 dan 2023 terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Perekonomian Makro Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Indikator	Target 2022	Target 2023
PDRB Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	6.146.419,39	6.333.952,66
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67%	3,05%
Inflasi (%)	7,70	3,90
Angka Kemiskinan (%)	5,02	4,86
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,28	4,35

Sumber: Data diolah, 2022

Selanjutnya, secara detail indikator-indikator gambaran perekonomian makro Kabupaten Bangka Tengah dari Tabel 4.1 akan diuraikan lebih detail pada sub bab 4.1.1 sampai 4.1.5 berikutnya.



4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dicerminkan dengan PDRB, atas dasar harga berlaku (ADHK) selama kurun waktu 12 tahun terakhir (2010-2021) selalu mengalami kenaikan. Proyeksi dari ADHK untuk tahun 2022 dan 2023 juga diproyeksi juga mengalami peningkatan. Jika diproyeksikan dalam nominal untuk ADHK pada tahun 2022 sebesar 6,23 trilyun rupiah dan tahun 2023 sebesar 6,43 trilyun rupiah. Jika dilihat dari pertumbuhan ADHK setiap tahunnya pada kurun waktu tersebut, terlihat terjadi penurunan ADHK pada tahun 2020 yaitu -2,86%. Namun untuk tahun berikutnya pada tahun 2021 pertumbuhan ADHK mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,76 dan kondisi tersebut diproyeksi untuk pertumbuhan ADHK pada tahun 2022 dan 2023 juga mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelum nya. Secara detail ADHK Kabupaten Bangka Tengah kurun waktu 2010 sampai 2023 tersaji pada Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023**

Tahun	PDRB Total ADHK (Dalam Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.502.395,80	-
2011	4.773.138,81	6,01%
2012	5.012.862,74	5,02%
2013	5.178.285,22	3,30%
2014	5.255.770,87	1,50%
2015	5.271.868,52	0,31%

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

2016	5.432.845,61	3,05%
2017	5.620.615,13	3,46%
2018	5.812.696,88	3,42%
2019	5.883.095,80	1,21%
2020	5.714.889,51	-2,86%
2021	5.986.897,23	4,76%
2022	6.146.419,39	2,66%
2023	6.333.952,66	3,05%

Keterangan: Data tahun 2010-2021 merupakan data real sedangkan
2022 dan 2023 merupakan hasil proyeksi.

Sumber: Data Kabupaten Bangka Tengah, Diolah 2022

Jika dilihat dari PDRB berdasarkan klasifikasi usaha, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 17 (tujuh belas) sektor ekonomi diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian ; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka Tengah, 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2021 diantaranya: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Sektor Kontruksi.

Jika dilakukan proyeksi pada tiap sektor klasifikasi usaha berdasarkan ADHK, maka untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan tiga sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah adalah: Sektor



Program Kerjasama LPPM UBB dengan Bappeda Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Secara detail terlihat pada **Tabel 4.3** berikut.



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

**Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023 (Dalam Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	471.434,56	509.826,37	550.402,74	610.453,90	684.828,45	750.236,18	786.741,81
Pertambangan dan Penggalan	1.046.028,04	1.076.934,83	1.082.792,57	1.102.366,67	1.116.385,98	1.125.122,15	1.078.950,81
Industri Pengolahan	1.103.422,90	1.105.424,48	1.106.881,07	968.690,81	805.989,74	556.008,62	570.467,10
Pengadaan Listrik dan Gas	1.304,46	1.611,84	1.703,96	1.910,14	2.101,03	2.305,56	2.553,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	243,63	266,05	285,44	304,38	321,99	349,55	366,35
Konstruksi	326.054,98	362.137,65	399.978,93	446.433,40	466.666,91	506.600,46	542.382,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	544.464,96	598.820,05	655.815,34	718.046,61	771.047,99	819.918,07	863.729,50
Transportasi dan Pergudangan	345.199,66	388.724,44	426.829,18	467.374,79	467.067,67	490.061,87	511.699,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96.253,51	105.214,97	113.961,79	123.393,06	133.097,91	143.582,28	149.498,80
Informasi dan Komunikasi	72.562,10	78.487,13	84.663,72	91.879,46	99.468,20	107.027,78	113.668,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	17.412,00	19.764,00	22.325,00	25.322,00	28.838,00	31.162,00	33.033,00
Real Estat	98.138,00	108.337,00	116.662,00	127.541,00	138.991,00	147.597,00	150.711,00
Jasa Perusahaan	9.224,00	10.130,00	10.894,00	11.755,00	12.720,00	13.607,00	13.637,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	221.892,00	247.283,00	267.703,00	295.060,00	324.352,00	356.709,00	378.159,00
Jasa Pendidikan	88.614,00	94.520,00	100.930,00	110.917,00	121.367,00	132.363,00	142.556,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.661,00	50.068,00	54.307,00	59.040,00	63.315,00	68.884,00	73.305,00
Jasa lainnya	14.486,00	15.589,00	16.727,00	17.797,00	19.212,00	20.334,00	21.386,00
PDRB Total ADHK	4.502.395,80	4.773.138,81	5.012.862,74	5.178.285,22	5.255.770,87	5.271.868,52	5.432.845,61



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Lanjutan. Tabel 4.3.

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	91.936,11	840.383,22	891.584,79	977.776,07	978.837,99	1.008.203,13	1.044.498,44
Pertambangan dan Penggalian	1.052.794,30	1.012.199,54	1.068.810,01	984.594,60	1.038.984,82	1.049.374,67	1.049.374,67
Industri Pengolahan	608.068,30	591.603,10	325.927,01	329.110,89	344.216,68	347.658,85	354.612,02
Pengadaan Listrik dan Gas	2.698,60	2.881,99	3.459,77	3.730,11	4.196,45	4.578,81	4.962,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	396,50	381,48	397,38	407,85	425,92	430,18	435,34
Konstruksi	563.240,16	588.982,24	643.652,49	641.796,62	669.186,49	688.592,90	707.184,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	928.355,70	977.418,82	1.023.701,76	981.736,56	1.034.640,27	1.065.679,48	1.106.325,85
Transportasi dan Pergudangan	546.400,20	590.255,81	597.833,80	450.879,29	483.181,92	488.013,74	495.333,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	156.937,50	166.465,27	181.864,27	178.131,95	195.799,66	201.506,45	207.551,64
Informasi dan Komunikasi	122.210,76	136.848,41	156.717,52	184.741,57	200.565,03	208.988,80	226.791,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	33.719,00	34.190,00	37.323,00	38.609,00	40.729,00	43.254,20	46.281,99
Real Estat	156.203,00	162.373,00	170.459,00	178.530,00	189.527,00	195.212,81	203.411,75
Jasa Perusahaan	14.088,00	14.818,00	15.408,00	14.013,00	14.747,00	15.336,88	16.027,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	392.662,00	427.146,00	473.919,00	456.591,00	480.749,00	495.171,47	518.444,53
Jasa Pendidikan	149.907,00	160.785,00	175.883,00	175.626,00	179.509,00	188.484,45	197.343,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.345,00	81.746,00	89.764,00	92.869,00	105.098,00	117.580,90	125.863,79
Jasa lainnya	22.653,00	24.219,00	26.391,00	25.746,00	26.503,00	28.351,68	29.509,44
PDRB Total ADHK	5.620.615,13	5.812.696,88	5.883.095,80	5.714.889,51	5.986.897,23	6.146.419,39	6.333.952,66

Keterangan: Data tahun 2010-2021 merupakan data real sedangkan 2022 dan 2023 merupakan hasil proyeksi.

Sumber: Data Kabupaten Bangka Tengah, Diolah 2022



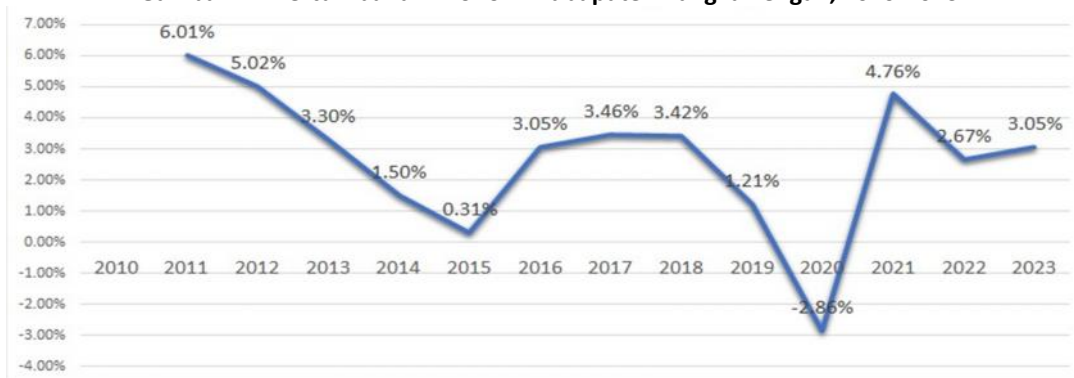
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Bangka Tengah secara umum akan positif namun melambat pada tahun 2022 dengan beberapa isu yang menjadi penyebab antara lain:

- Base Line Pertumbuhan yang sudah tinggi pada tahun 2021 dikarenakan ekonomi bangka tengah baru saja pulih akibat Pandemi COVID 19
- Tingkat Inflasi yang diindikasikan meningkat pada tahun 2022 akibat dari kenaikan harga BBM
- Secara Trend Line dalam kurun waktu 2010 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah cenderung melambat namun secara rata rata tetap positif namun fluktuasinya cukup tinggi.

Secara detail, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023



Keterangan: Data tahun 2010-2021 merupakan data real sedangkan 2022 dan 2023 merupakan hasil proyeksi.

Sumber: Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

4.1.3. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2023 menunjukkan fluktuatif. Proyeksi tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2022 sebesar 7,70 persen dan tahun 2023 sebesar 3,90 persen. Kenaikan signifikan inflasi pada tahun 2022 salah satunya disebabkan naiknya

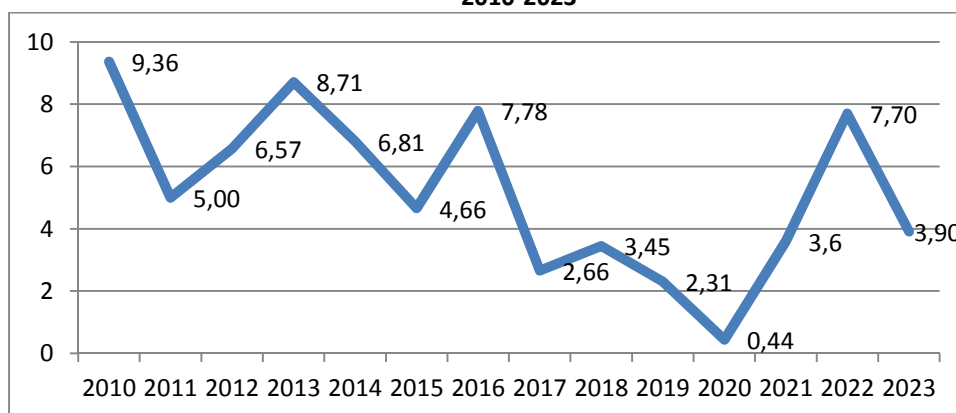


LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

harga BBM yang signifikan. Secara detail tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010 sampai 2023 tersaji pada Gambar 4.2 berikut. Gambaran Inflasi di Kabupaten Bangka Tengah ini merupakan gambaran dari Inflasi kota Pangkalpinang yang dijadikan acuan inflasi bagi empat Kabupaten di Pulau Bangka.

Gambar 4.2 Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023

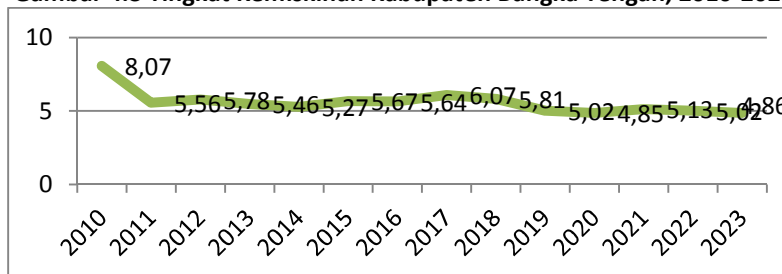


Keterangan: Data tahun 2010-2021 merupakan data real sedangkan 2022 dan 2023 merupakan hasil proyeksi.
Sumber: Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

4.1.4 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah terlihat tren yang menurun setiap tahunnya. Proyeksi tingkat kemiskinan untuk tahun 2022 sebesar 5,02 persen dan tahun 2023 diperkirakan menurun dengan persentase sebesar 4,86 persen. Secara detail gambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2010 sampai 2023 terlihat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023



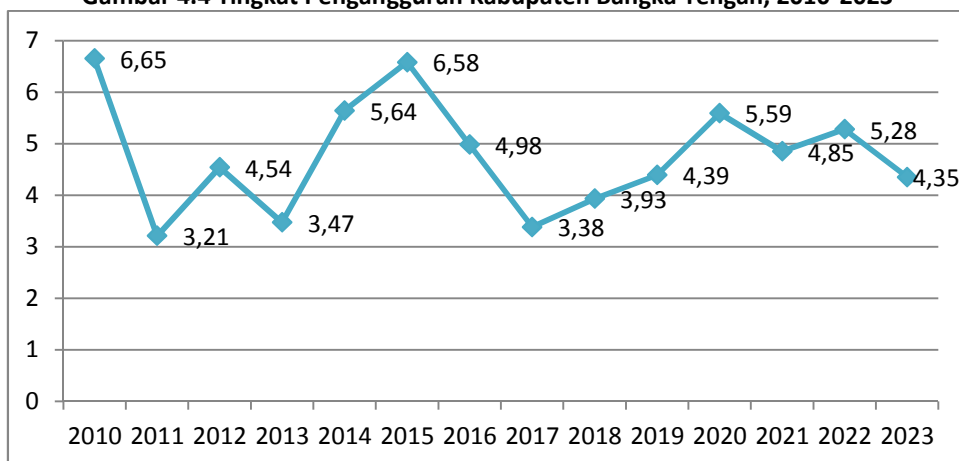
Keterangan: Data tahun 2010-2021 merupakan data real sedangkan 2022 dan 2023 merupakan hasil proyeksi.
Sumber: Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.



4.1.5 Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah terlihat tren yang berfluktuatif setiap tahunnya. Proyeksi tingkat pengangguran untuk tahun 2022 sebesar 5,28 persen dan tahun 2023 diperkirakan menurun dengan persentase sebesar 4,35 persen. Secara detail gambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2010 sampai 2023 terlihat pada Gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2023



Keterangan: Data tahun 2010-2021 merupakan data real sedangkan 2022 dan 2023 merupakan hasil proyeksi.

Sumber: Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tahun 2022 sebesar 2,67% dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 3,05%.
2. Tingkat inflasi pada tahun 2022 diproyeksikan 7,70% dan diperkirakan menurun tahun 2023 dengan persentase sebesar 3,90%.
3. Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 diproyeksikan 5,02% dan diperkirakan menurun tahun 2023 dengan persentase sebesar 4,86%.
4. Tingkat pengangguran diproyeksikan tahun 2022 sebesar 5,28% dan diperkirakan menurun tahun 2023 dengan persentase sebesar 4,35%.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Proyeksi makro ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah Untuk tahun 2022 dan 2023 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah diproyeksikan akan terjadi penurunan tahun 2022 sebesar -3,01% dan diperkirakan akan peningkatan 14% pada tahun 2023.
2. Pendapatan Asli daerah diproyeksikan meningkat 21,03% pada tahun 2022 dan meningkat 9,76% pada tahun 2023. Faktor penyebab terbesar kenaikan PAD ini diasumsikan terjadinya kenaikan pendapatan dari pajak daerah.



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

3. Dana Perimbangan diproyeksikan meningkat pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 3,78% dan 14,35%.
4. Dana Bagi Hasil tahun 2022 diproyeksikan menurun -31,96% pada tahun 2021 dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan 64,12% pada tahun 2023.
5. Dana Alokasi Umum diproyeksikan meningkat 0,12% pada tahun 2022 dan tahun 2023 diperkirakan meningkat sebesar 23,44%.
6. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan meningkat 46,87% pada tahun 2022 dan tahun 2023 diperkirakan akan turun -27,49%.
7. Belanja daerah diproyeksikan meningkat pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 17,56% dan 3,38%. Peningkatan tersebut terjadi pada aspek belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

4.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah (2022-2023)

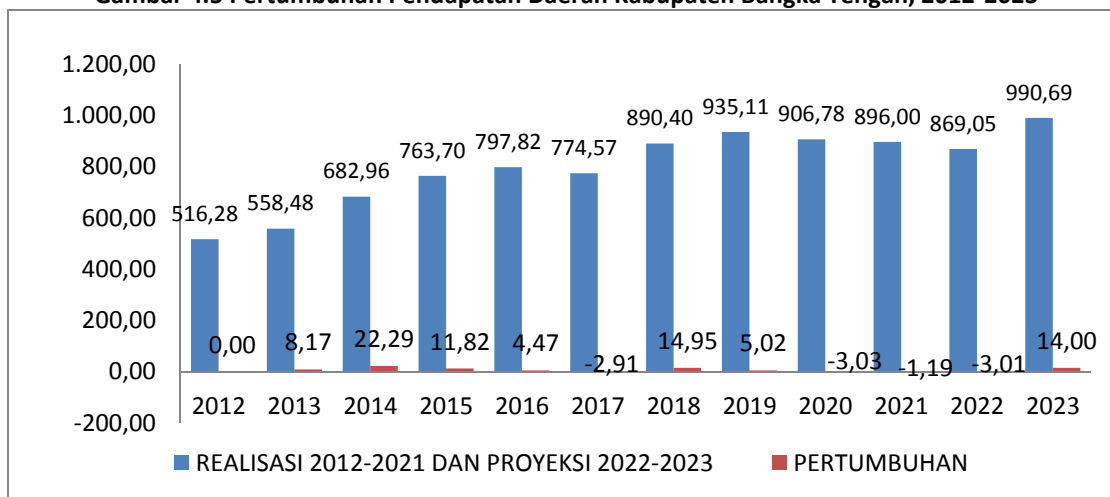
Pendapatan daerah diproyeksikan akan terjadi peningkatan pada tahun 2022. Ini juga berimbas dari proyeksi naiknya komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi Pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing -3,01% dan 14,00%, yang jika dituangkan dalam nilai nominal pada tahun 2022 sebesar 869,05 milyar rupiah dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2023 sebesar 990,69 milyar rupiah. Gambaran pendapatan daerah secara detail terlihat pada Gambar 4.5 berikut:



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Gambar 4.5 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

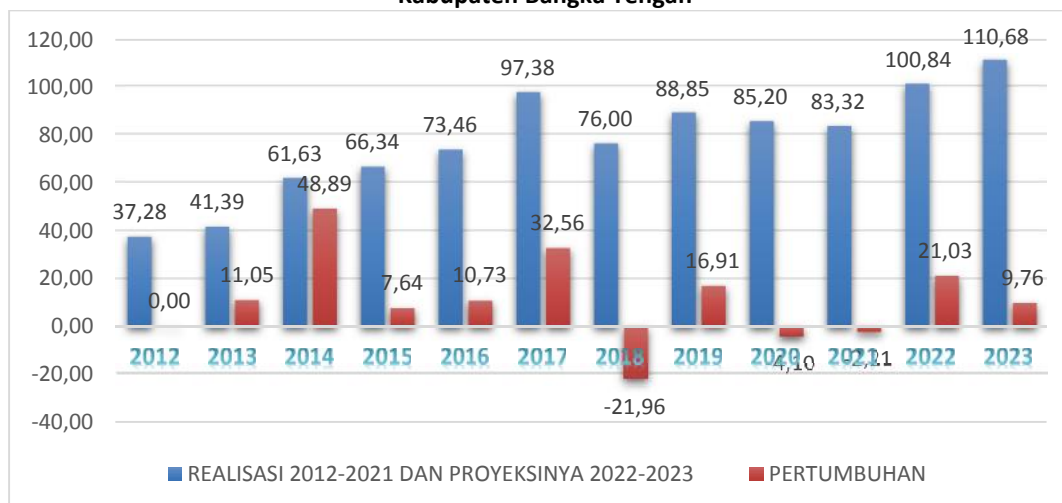
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan. Proyeksi PAD tahun 2022 sebesar 21,03% meningkat dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2023 meningkat sebesar 9,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dinominalkan PAD diproyeksikan masing-masing tahun 2022 sebesar 100,84 milyar rupiah dan tahun 2023 110,68 milyar rupiah.

Peningkatan PAD diproyeksi naik pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan adanya peningkatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jika dinominalkan nilai proyeksi dari pendapatan pajak daerah tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 62,63 milyar rupiah dan 66 milyar rupiah. Sedangkan pendapatan dari hasil retribusi daerah tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 8,95 milyar rupiah dan 8,56 milyar rupiah. Secara detail realisasi, proyeksi dan pertumbuhan PAD Kabupaten Bangka terlihat pada Gambar 4.6 berikut.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

**Gambar 4.6 Realisasi, Proyeksi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 - 2023
Kabupaten Bangka Tengah**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

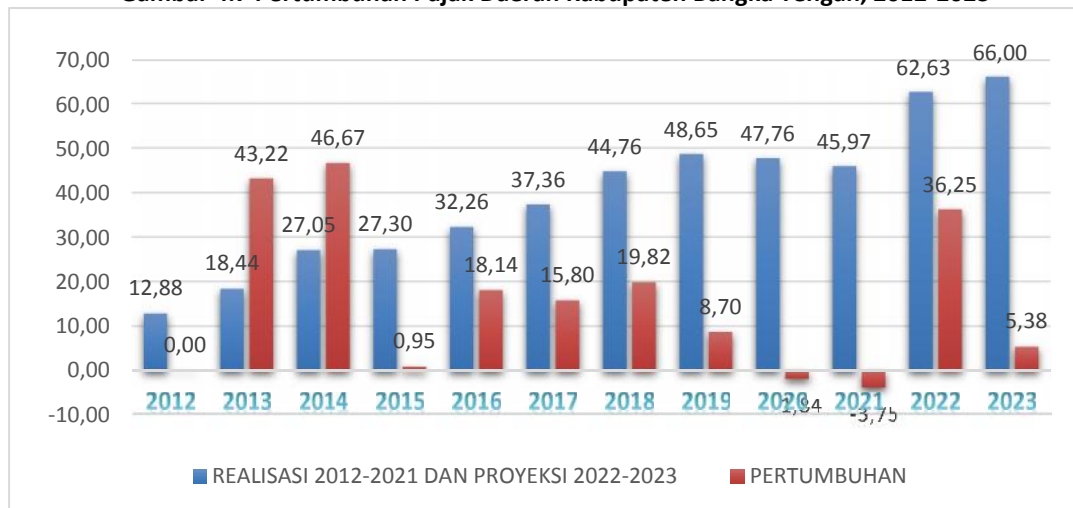
Pertumbuhan dari pajak daerah diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar 36,25% dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 naik sebesar 5,38% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk pertumbuhan retribusi daerah diproyeksikan juga meningkat pada tahun 2022 sebesar 92,93% dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 diproyeksikan akan menurun sebesar -4,34% dibandingkan tahun 2022.

Secara detail gambaran dari realisasi tahun 2012-2021, proyeksi tahun 2022 dan 2023 dan pertumbuhan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terlihat pada Gambar 4.7 dan 4.8 berikut.

LAPORAN AKHIR

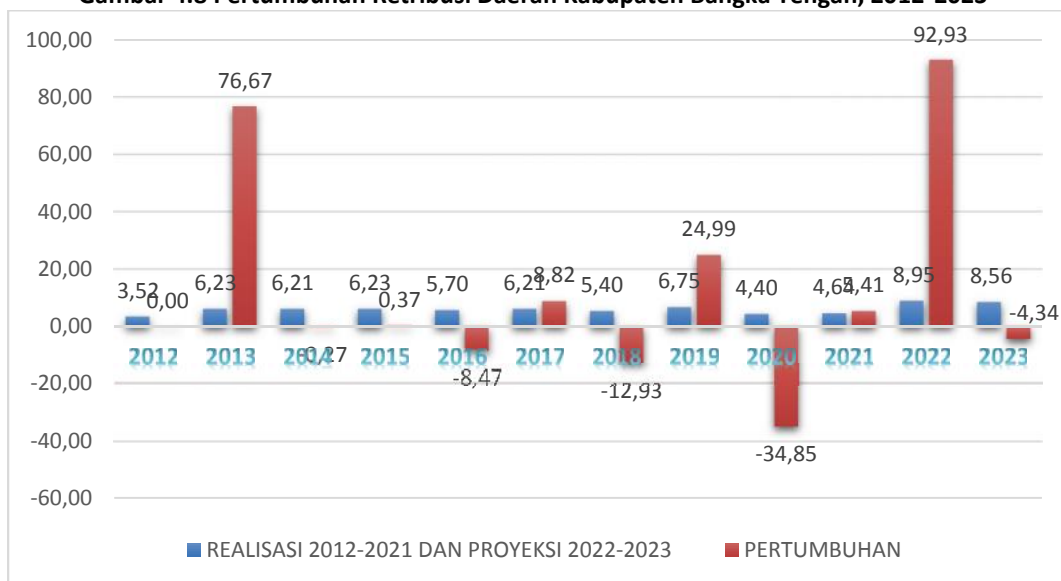
Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Gambar 4.7 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Gambar 4.8 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Peningkatan pendapatan asli daerah yang diproyeksi naik pada tahun 2022 dan 2023 juga diproyeksikan naiknya dari komponen yang lain yaitu pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Walaupun angka kenaikan tersebut relatif lebih kecil

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

dibandingkan dari komponen pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Proyeksi pertumbuhan pada tahun 2022 dan 2023 untuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing sebesar 10,06% dan 6,09% dibandingkan tahun sebelumnya dan jika dinominalkan tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 4,66 milyar rupiah dan 4,94 milyar rupiah.

Sedangkan gambaran proyeksi pertumbuhan lain-lain untuk pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 diproyeksikan turun sebesar 13,61% dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 diproyeksikan pertumbuhannya naik sebesar 26,75% dibandingkan tahun 2022. Jika dinominalkan nilai proyeksi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 24,60 milyar rupiah dan 31,18 milyar rupiah.

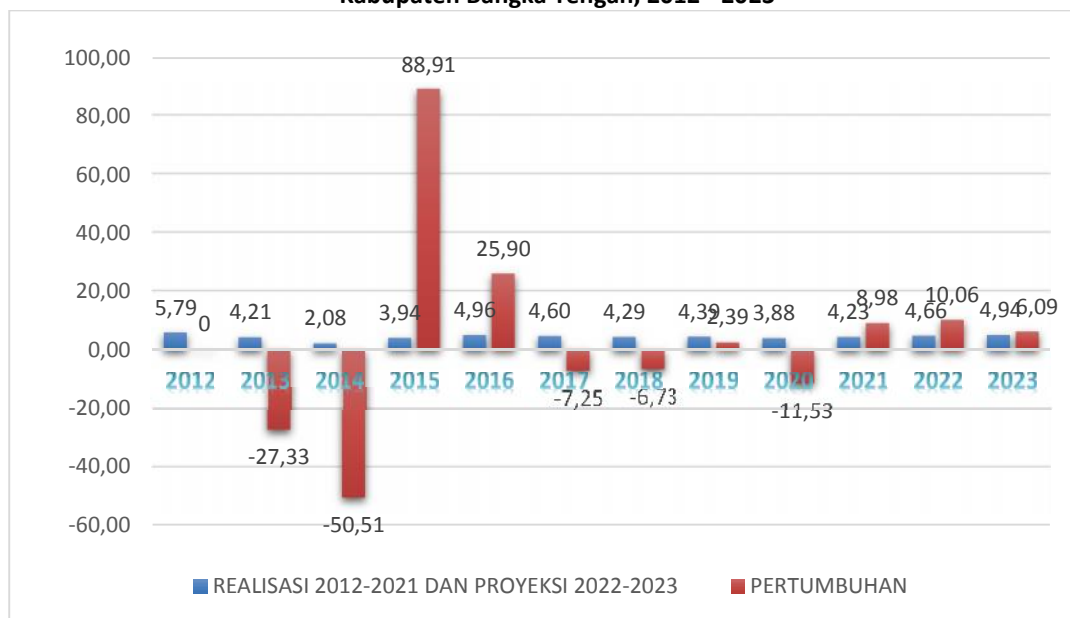
Secara detail gambaran dari realisasi tahun 2012-2021, proyeksi tahun 2022 dan 2023 dan pertumbuhan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terlihat pada gambar 4.9 dan 4.10 berikut.



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Gambar 4.9 Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Bangka Tengah, 2012 - 2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Gambar 4.10 Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Proyeksi naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023 disebabkan beberapa hal. Asumsi kenaikan



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

PAD tahun 2022 dan 2023 ini juga didasari atas kondisi pulihnya ekonomi yang sempat turun pada tahun 2021 karena kondisi Pandemi Covid 2019 dan diprediksi akan pulih pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, diprediksi akan terjadinya meningkatnya objek dan wajib pajak yang berimbas bagi kenaikan pajak dan retribusi daerah. Dukungan teknologi untuk peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah juga berimbas terhadap kenaikan komponen utama PAD Bangka Tengah yakni pajak dan retribusi daerah.

Untuk komponen PAD yang lain juga diproyeksi akan naik seiring berjalan tata kelola yang baik terkait penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada BPRS Syariah Bangka Belitung yang diharapkan akan berdampak bagi naiknya bagi hasil dividen. Selain itu, dividen juga diharapkan dapat berpotensi naik dari dua Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Bangka Tengah, yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah dan PT. Bangka Tengah Prima. Detail dividen bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui penyertaan modal khususnya kepada pihak swasta dari tahun 2012-2021 secara detail terlihat pada Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4 Pembagian Dividen atas Penyertaan Modal pada Swasta (Lembaga Keuangan)
Kabupaten Bangka tengah, 2012-2021**

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Selisih (Rupiah)	Capaian (%)
2012	4.000.000.000,00	5.794.090.775,33	1.794.090.775	144
2013	5.600.000.000,00	4.210.382.027,53	(1.389.617.972)	75
2014	6.200.000.000,00	2.083.583.289,72	(4.116.416.710)	33
2015	6.200.000.000,00	3.936.009.807,34	(2.263.990.193)	63
2016	6.712.293.000,00	4.955.608.127,10	(1.756.684.873)	73
2017	6.200.000.000,00	4.596.392.783,02	(1.603.607.217)	74
2018	4.650.000.000,00	4.286.928.630,80	(363.071.369)	92
2019	4.775.000.000,00	4.389.344.222,36	(385.655.778)	91
2020	3.850.000.000,00	3.883.445.314,57	33.445.315	100
2021	4.875.000.000,00	4.232.316.806,25	(642.683.194)	86



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Jika dilihat dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, terlihat sejak tahun 2012-2021 hanya terjadi pada dua tahun saja realisasi melebihi target yang ditetapkan dari penyertaan modal tersebut, yaitu pada tahun 2012 dan 2020. Namun untuk tahun-tahun yang lain realisasi dari target yang diinginkan tidak mencapai target yang diinginkan.

Dari aspek target yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2012-2021 terlihat pola anggaran yang tidak terjadi tren menaik. Pola penganggaran yang ditargetkan untuk mendapatkan dividen dari penyertaan modal ini malah cenderung menurun yang terlihat dari tahun 2017 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.200.000.000,00 pada tahun 2020 sebesar Rp 3.850.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 4.875.000.000,00.

Sebagai salah komponen Pendapatan Asli Daerah tentunya proyeksi untuk tahun 2022 dan 2023 perlu menjadi perhatian bagi stakeholder terkait. Jika proyeksi untuk target laba/dividen yang diinginkan meningkat pada tahun 2022 dan 2023, maka mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Idealnya satu rupiah tambahan investasi berbentuk penyertaan modal ke pihak swasta, minimalnya bisa menaikkan menjadi dua rupiah dari investasi tersebut. Artinya dividen yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya tentunya terjadi tren meningkat. Kebijakan keuangan daerah terkait penyertaan modal pemerintah diperlukan komitmen yang kuat dari pihak Swasta atau BUMD dalam menjalankan penyertaan modal dari pemerintah tersebut.

4.2.2 Dana Perimbangan

Realisasi dari Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah terlihat tren yang menurun. Ini tercermin pada kondisi tiga tahun sejak tahun 2019 sampai 2021, dimana pertumbuhannya masing-masing pada tahun 2019 sebesar 7,47%, 2020

Program Kerjasama LPPM UBB dengan Bappeda Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022



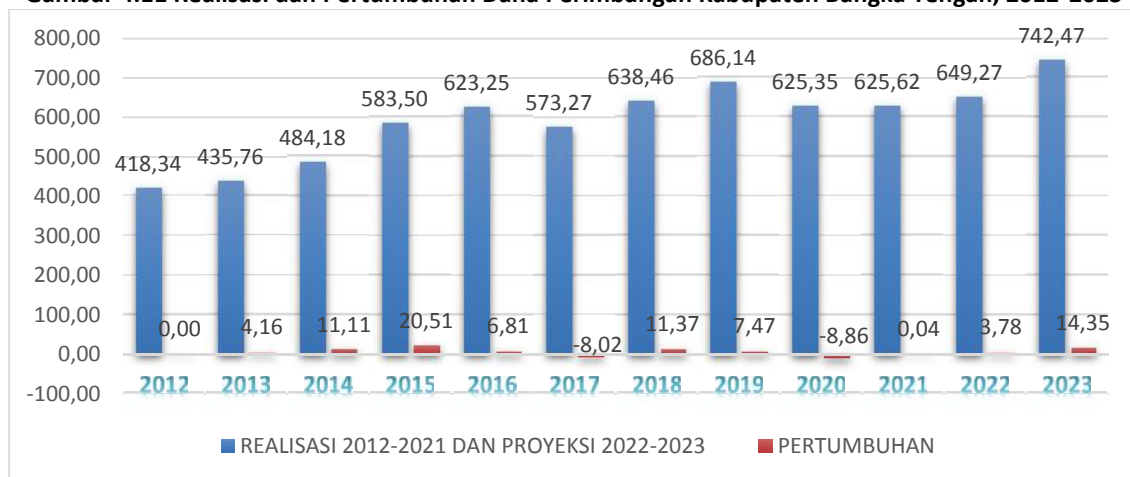
LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

sebesar -8,86% dan 2021 sebesar 0,04% tahun Dana Perimbangan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dinominalkan dana perimbangan tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 686,14 milyar rupiah, 625,35 milyar rupiah dan Rp 625,62 milyar rupiah.

Proyeksi pertumbuhan dana perimbangan untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 diproyeksikan naik 3,78% dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 naik sebesar 14,35% dibandingkan tahun 2022. Jika dinominalkan nilai proyeksi dana perimbangan pada tahun 2022 sebesar 649,27 milyar rupiah dan tahun 2023 sebesar 742,47 milyar rupiah. Secara detail realisasi dana perimbangan Kabupaten Bangka Tengah, dari tahun 2012 sampai 2021 tersaji pada Gambar 4.11 berikut:

Gambar 4.11 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Komponen pertama dari Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah yang akan diuraikan lebih lanjut adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Nilai Realiasi yang dicapai pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat sebesar 94,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terjadi karena faktor pandemi Covid 19 yang mana terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.

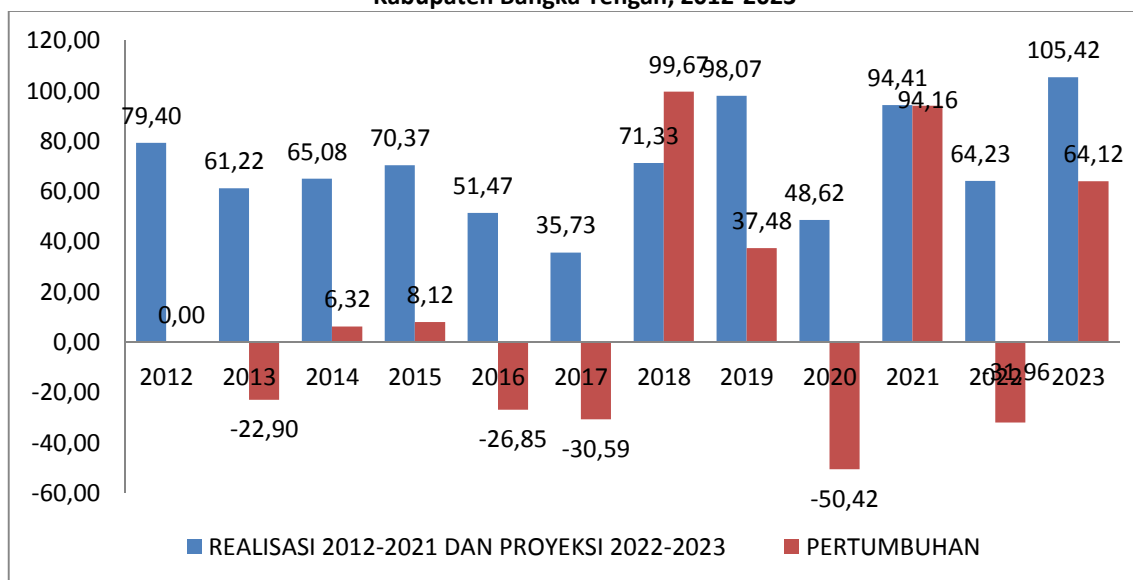


LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Proyeksi untuk Dana Bagi Hasil tahun 2022 diproyeksikan pertumbuhan akan menurun dibandingkan tahun 2021 yakni turun sebesar -31,96% dan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan DBH akan meningkat pada tahun 2023 yakni sebesar 64,12% dibandingkan tahun 2022. Jika dinominalkan masing-masing proyeksi untuk tahun 2022 dan 2023 sebesar 64,23 milyar rupiah dan 105,42 milyar rupiah. Detail dari realiasi dan pertumbuhan DBH pajak/bukan pajak Kabupaten Bangka tengah tahun 2012 sampai 2023 disajikan terlihat pada Gambar 4.12 berikut.

Gambar 4.12 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Komponen kedua dari Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah yang akan diuraikan lebih lanjut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi dan pertumbuhan DAU Kabupaten Bangka Tengah pada kondisi tiga tahun terakhir terlihat terjadi tren menurun. Pertumbuhan DAU Tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5,49%, -8,34% dan -1,69% yang jika dinominalkan

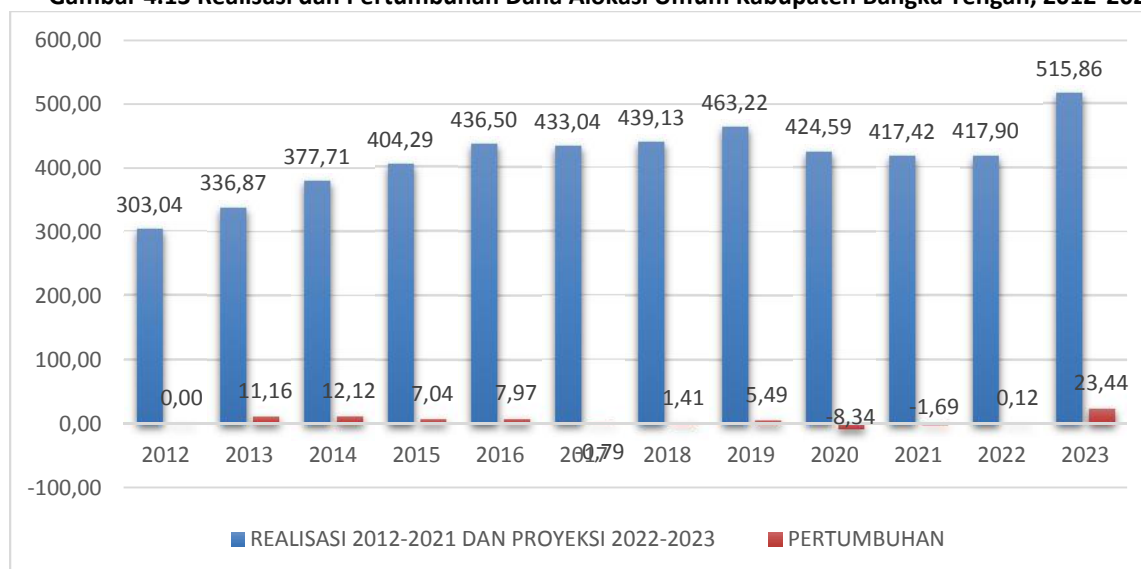
LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

masing-masing sebesar 463,22 milyar rupiah, 424,49 milyar rupiah, dan 417,90 milyar rupiah.

Proyeksi DAU untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2022 sebesar 417,90 milyar rupiah dan tahun 2023 sebesar 515,86 milyar rupiah atau meningkat 23,44% dibandingkan tahun 2022. Secara detail tersaji seperti Gambar 4.13 berikut.

Gambar 4.13 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



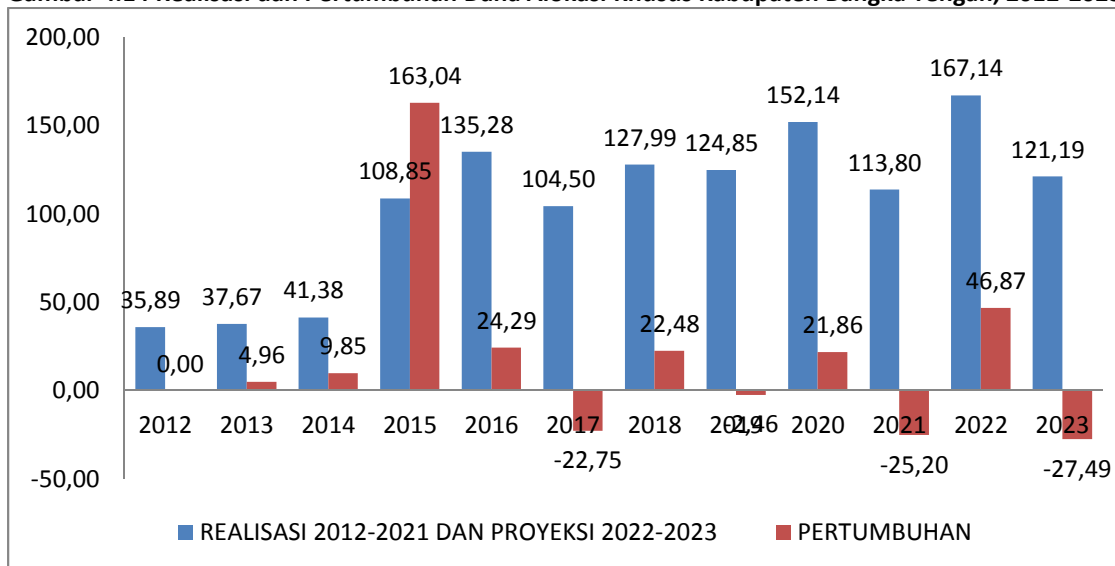
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Komponen ketiga dari Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah yang akan diuraikan lebih lanjut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan secara rinci realisasi dan pertumbuhan DAK Kabupaten Bangka Tengah terlihat pada Gambar 4.14 berikut.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Gambar 4.14 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Berdasarkan Gambar 4.14, terlihat realisasi DAK pada tahun 2021 turun sebesar 25,20% atau turun 38,34 milyar rupiah dibandingkan 2020. Pada tahun 2020 jumlah DAK Kabupaten Bangka Tengah sebesar 152,14 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar Rp 11,80 milyar rupiah. Proyeksi DAK Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2022 dan 2023 kondisi idealnya diharapkan akan terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 46,87% dibandingkan tahun 2021 yang jika dinominalkan tahun 2022 DAK sebesar 167,14 milyar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 121,19 milyar rupiah atau turun sebesar 27,49% dibandingkan tahun 2022.

Potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah dapat menjadi dasar untuk stimulus dalam peningkatan DAK yang akan diajukan ke Pemerintah Pusat. Bentuk pengembangan dari peningkatan DAK tersebut dapat difokuskan bagi pengembangan infrastruktur daerah sebagai dasar untuk peningkatan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bangka Tengah, seperti: pengembangan infrastruktur



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

kepelabuhanan, jalan pada daerah pesisir dan infrastruktur lainnya terkait potensi Kelautan Perikanan yang saat ini fokus terhadap pengembangan industri pengolahan investasi perebusan ikan di Batu Belubang, selanjutnya pengembangan potensi pariwisata, potensi perkebunan, perhubungan, dan infrastruktur lainnya di OPD Pekerjaan Umum dan Perkim di Kabupaten Bangka Tengah. Tentunya jika DAK akan diproyeksikan naik pada tahun 2022 dan 2023 maka diperlukan komitmen dari OPD terkait di Kabupaten Bangka Tengah.

4.2.3 Proyeksi Belanja Daerah (2022-2023)

Proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2022 dan 2023 naik dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar tahun 2022 naik sebesar 17,56% dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2023 naik sebesar 3,38% dibandingkan tahun 2022. Detail belanja daerah dari tahun 2012 sampai 2023 terlihat pada Gambar 3.12 dan realisasi komponen belanja daerah tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi masing-masing pos belanja untuk tahun 2022 dan 2023 terlihat pada Gambar 4.15 berikut.

**Gambar 4.15 Realisasi, Proyeksi dan Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Proyeksi belanja daerah yang terbesar diproyeksikan naik pada tahun 2022 dan 2023 adalah komponen belanja operasi yaitu tahun 2022 sebesar Rp 769,38 milyar dan tahun 2023 sebesar Rp 777,36 milyar. Kenaikan tersebut terlihat dari semua Komponen-komponen belanja daerah yang ada. Secara detail kenaikan tersebut terlihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Realisasi, Proyeksi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2020-2023

Belanja	Realisasi 2020 (Milyar Rupiah)	Realisasi 2021 (Milyar Rupiah)	Proyeksi 2022 (Milyar Rupiah)	Proyeksi 2023 (Milyar Rupiah)
Belanja Daerah	908,47	872,60	1.025,83	1.060,52
Belanja Operasi	757,87	674,11	769,38	777,36
Belanja Modal	131,58	131,58	131,13	147,68
Belanja Tidak Terduga	19,011	10	10	12,5
Belanja Transfer	0	112,34	115,32	122,97

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, data diolah 2022.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai PPPK;
- Kebutuhan belanja mengikat berupa pengeluaran rutin dan operasional pemerintah daerah yang cenderung selalu mengalami peningkatan;
- Kebutuhan belanja pelayanan publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026;
- Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
- Diperlukan anggaran untuk percepatan untuk pembangunan prioritas Kabupaten Bangka Tengah.

4.2.4 Anggaran Program Tematik Prioritas Pembangunan Tahun 2023



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Proyeksi anggaran Program Prioritas untuk 5 (lima) program tematik dianggarkan sebesar 297,6 milyar rupiah. Anggaran terbesar direncanakan pada program pertumbuhan ekonomi inklusif, yakni sebesar Rp 156,6 milyar. Program tematik tersebut direncanakan untuk percepatan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19 yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya melalui program Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata. Secara detail anggaran masing-masing program tematik terlihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Anggaran Program Prioritas Kabupaten Bangka Tengah, 2023

No	Tema Program Prioritas	OPD Pelaksana	Total Anggaran yang Diperlukan (Dalam Milyar Rupiah)
1	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	DIPERKAN, DIPERTA, DISPERINDAGKOPUKM, DISPANG, DPMPK, DINBUDPARPORA, DPUTRP, DINDIK, DINKES, DIPERKIMHUB, DINSOSPMD, SETDA	156,6
2	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	DINSOSPMD, SETDA, DINDIK, DINKES, DIPERKIMHUB, DUKCAPIL, DISKOMINFOSTA dan KECAMATAN	41,5
3	Penurunan Stunting	DINKES, DPPKBPPPA, DINSOSPMD, DINDIK, DIPERKIMHUB, DPUTRP, DLH, DISPANG, DIPERKAN dan BAPPELITBANGDA.	44,5
4	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT, SETDA, BAPPELITBANGDA, BPKAD, BKPSDMD, DUKCAPIL, DISKOMINFOSTA, DKP, dan KECAMATAN	17,3
5	Pengembangan Pariwisata	DINBUDPARPORA, DIPERKAN, DIPERTA, DISPERINDAGKOPUKM, DPMPK, DLH, DPUTRP, DINDIK, DIPERKIMHUB, BPPRD, DISKOMINFOSTA, SATPOLPP, BPBD, DINSOSPMD, dan SETDA	37,7

Total Pagu Anggaran Prioritas (2023)

297,6

Sumber: Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Tengah, Bappelitbangda, 2023

4.2.5 Neraca Daerah (2022-2023)

Neraca daerah Kabupaten Bangka yang disusun merupakan gambaran Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah dari tahun 2016-2021. Pertumbuhan rata-rata total aset Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 mencapai 4,65%. Pertumbuhan tertinggi total aset terjadi pada tahun 2018 sebesar 11,84%. Namun secara nominal jumlah aset Kabupaten Bangka Tengah selalu terjadi peningkatan dan tertinggi jumlah aset terdapat pada tahun 2021. Secara detail jumlah aset Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Nilai dan Pertumbuhan Total Aset Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021

Tahun	Total Aset (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	1.210.428.784.654,03	0,60%
2017	1.239.330.981.589,88	2,39%
2018	1.386.095.748.341,22	11,84%
2019	1.474.197.198.235,22	6,36%
2020	1.536.130.164.932,03	4,20%
2021	1.574.645.547.872,38	2,51%
Rata-rata Pertumbuhan		4,65%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pertumbuhan rata-rata aset lancar Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 mencapai 14,71%. Pertumbuhan tertinggi aset lancar terjadi pada tahun 2018 sebesar 113,22%. Namun secara nominal aset lancar selalu terjadi peningkatan dan tertinggi jumlah aset lancar terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp 136.220.388.252,34. Secara detail jumlah dan pertumbuhan aset lancar Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.8 berikut.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Tabel 4.8 Nilai dan Pertumbuhan Aset Lancar Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021

Tahun	Aset Lancar (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	50.463.367.256,92	-54,76%
2017	60.538.536.686,87	19,97%
2018	129.081.764.689,73	113,22%
2019	106.914.377.498,81	-17,17%
2020	108.742.848.094,18	1,71%
2021	136.220.388.252,34	25,27%
Rata-rata Pertumbuhan		14,71%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pertumbuhan rata-rata aset tetap Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 mencapai 5,21%. Pertumbuhan tertinggi aset tetap terjadi pada tahun 2019 sebesar 9,91%. Namun secara nominal jumlah aset tetap selalu terjadi peningkatan dan tertinggi jumlah aset tetap terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp 1.374.443.124.454,55. Secara detail jumlah dan pertumbuhan aset tetap Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.9 berikut.

**Tabel 4. 9 Nilai dan Pertumbuhan Aset Tetap
Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021**

Tahun	Aset Tetap (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	1.085.539.431.316,64	6,82%
2017	1.109.607.637.920,35	2,22%
2018	1.184.065.400.356,70	6,71%
2019	1.301.352.404.184,29	9,91%
2020	1.362.566.459.414,07	4,70%
2021	1.374.443.124.454,55	0,87%
Rata-rata Pertumbuhan		5,21%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Namun untuk aset lainnya Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 terjadi tren penurunan setiap tahunnya terlihat mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Rata-rata penurunan dari aset lainnya menurun mencapai 6,13%. Secara nominal jumlah aset lainnya sampai tahun 2021 Rp



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

10.176.952.962,71. Secara detail jumlah dan pertumbuhan aset lainnya di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.10 berikut.

**Tabel 4. 10 Nilai dan Pertumbuhan Aset Lainnya
Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021**

Tahun	Aset Lainnya (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	16.311.553.464,60	-1,09%
2017	12.147.331.734,79	-25,53%
2018	15.709.151.066,92	29,32%
2019	13.848.242.555,31	-11,85%
2020	10.726.080.879,45	-22,55%
2021	10.176.952.962,71	-5,12%
Rata-rata Pertumbuhan		-6,13%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Piutang Pajak Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 terjadi tren naik setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata piutang pajak sebesar 8,75%. Nilai piutang pajak terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 21,37 milyar rupiah. Secara detail jumlah dan pertumbuhan piutang pajak di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11 Nilai dan Pertumbuhan Piutang Pajak
Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021**

Tahun	Piutang Pajak (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	15.130.142.285,50	8,73%
2017	16.422.422.213,00	8,54%
2018	18.223.410.373,50	10,97%
2019	19.415.372.039,00	6,54%
2020	21.368.791.382,00	10,06%
2021	23.011.270.872,00	7,69%
Rata-rata Pertumbuhan		8,75%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022



Piutang Retribusi Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 terjadi tren naik setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata piutang retribusi sebesar 42,18%. Nilai piutang retribusi terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 1,58 milyar rupiah. Secara detail jumlah dan pertumbuhan piutang pajak di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.12 berikut.

**Tabel 4.12 Nilai dan Pertumbuhan Piutang Retribusi
Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021**

Tahun	Piutang Retribusi (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	626.135.262	136,39%
2017	1.010.379.467	61,37%
2018	1.415.281.207	40,07%
2019	1.185.748.097	-16,22%
2020	1.414.527.963	19,29%
2021	1.587.090.851	12,20%
Rata-rata Pertumbuhan		42,18%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Kewajiban Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 terjadi tren fluktuatif dan semakin berkurang jumlah kewajiban. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, kewajiban yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah yang berbentuk utang jangka pendek semakin berkurang. Dari tahun 2016 sebesar Rp32.372.204.896,80 dan pada tahun 2021 jumlah kewajiban tersisa sebesar Rp 16.304.782.442,56. Secara detail jumlah dan pertumbuhan kewajiban Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.13 berikut.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

**Tabel 4.13 Nilai dan Pertumbuhan Kewajiban
Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021**

Tahun	Kewajiban (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	32.372.204.896,80	1.230,39%
2017	21.042.797.111,97	-35,00%
2018	11.415.126.454,98	-45,75%
2019	24.055.688.718,23	110,74%
2020	18.957.235.851,91	-21,19%
2021	16.304.782.442,56	-13,99%
Rata-rata Pertumbuhan		204,20%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Ekuitas Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 terjadi tren naik setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata ekuitas sebesar 4,53%. Nilai ekuitas terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 1.558.340.765.429,82. Secara detail jumlah dan pertumbuhan aset Ekuitas di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 – 2021 terlihat pada Tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.14 Nilai dan Pertumbuhan Ekuitas
Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2021**

Tahun	Ekuitas (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	1.178.056.579.757,23	-1,89%
2017	1.218.288.184.477,91	3,42%
2018	1.374.680.621.886,24	12,84%
2019	1.450.141.509.516,99	5,49%
2020	1.517.172.929.080,12	4,62%
2021	1.558.340.765.429,82	2,71%
Rata-rata Pertumbuhan		4,53%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Secara lengkap Neraca Kabupaten Bangka Tengah periode 2015-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Tabel 4.15 Neraca Kabupaten Bangka Tengah periode 2015-2021

U R A I A N	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ASET	1.203.163.347.558,85	1.210.428.784.654,03	1.239.330.981.589,88	1.386.095.748.341,22	1.474.197.198.235,22	1.536.130.164.932,03	1.574.645.547.872,38
ASET LANCAR	111.552.024.449,37	50.463.367.256,92	60.538.536.686,87	129.081.764.689,73	106.914.377.498,81	108.742.848.094,18	136.220.388.252,34
Kas dan Setara Kas	0	0	0	0	0	54.200.543.671,39	77.610.792.451,75
Kas di Kas Daerah	59.681.794.885,86	72.435.507,21	1.125.874.350,38	20.572.451.846,29	46.893.585.417,04	47.153.876.557,41	61.082.023.650,66
Kas di Bendahara Pengeluaran	70.509.386,00	176.739.412,00	6.086.900,00	74.742.701,82	10.377.516,50	421.500,00	32.164.155,00
Kas di Bendahara Penerimaan	70.384.400,00	25.023.500,00	0,00	0,00	10.115.000,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	2.570.789.081,41	1.203.667.997,01	1.317.826.952,45	575.830.649,68	1.221.548.706,10	1.483.604.981,98	12.847.265.315,09
Kas Dana BOS	2.789.811.502,00	4.348.143.350,00	3.858.798.807,00	4.588.747.481,00	5.573.454.060,00	1.837.977.911,00	575.364.948,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			1.776.165.084,00	2.094.695.110,00	2.014.955.197,00	3.541.162.625,00	2.937.557.044,00
Kas Lainnya	2.018.621.317,96	0,00	68.817.507,00	67.701.853,00	43.138.340,00	183.500.096,00	136.417.339,00
Setara Kas	0,00	1.685.158.341,00		0,00	25.100.407,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	13.915.560.878,50	15.130.142.285,50	16.422.422.213,00	18.223.410.373,50	19.415.372.039,00	21.368.791.382,00	23.011.270.872,00
Piutang Retribusi	264.876.715,00	626.135.262,00	1.010.379.467,00	1.415.281.207,00	1.185.748.097,00	1.414.527.963,00	1.587.090.851,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309.038.361,42
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725.119.829,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825.424.823,80	21.411.520.874,00
Piutang Lainnya	16.606.985.180,66	20.764.863.574,63	30.556.960.827,21	77.105.001.865,48	26.733.036.020,25	4.060.108.229,50	0,00



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Penyisihan Piutang	-9.870.726.133,10	-12.204.988.281,71	-15.301.608.192,54	-17.713.483.386,97	-19.406.964.096,78	-17.389.494.547,57	-26.583.036.207,44
Beban Dibayar Dimuka	0,00	22.916.666,67	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	23.433.417.235,08	18.613.129.642,61	19.684.506.471,37	22.070.340.702,93	23.189.427.138,56	25.537.826.743,06	26.873.711.049,61
INVESTASI JANGKA PANJANG	58.935.323.900,87	58.114.432.615,87	57.037.475.247,87	57.239.432.227,87	52.082.173.996,81	54.094.776.544,33	53.805.082.202,78
Investasi Non Permanen	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
Investasi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir				6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
Penyertaan Modal	52.435.323.900,87	51.614.432.615,87	50.537.475.247,87	50.739.432.227,87	45.582.173.996,81	47.594.776.544,33	47.305.082.202,78
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP	1.016.185.069.087,17	1.085.539.431.316,64	1.109.607.637.920,35	1.184.065.400.356,70	1.301.352.404.184,29	1.362.566.459.414,07	1.374.443.124.454,55
Tanah	83.103.988.800,50	155.898.889.278,04	154.567.191.791,04	169.198.323.610,04	224.892.508.105,04	241.165.081.609,54	244.482.082.156,78
Peralatan dan Mesin	213.710.682.722,01	259.253.125.761,19	263.499.279.580,19	302.120.147.035,05	348.871.285.648,05	396.517.833.847,65	430.220.453.543,55
Gedung dan Bangunan	494.032.321.251,84	478.920.574.661,09	494.961.400.280,42	591.860.881.628,20	646.471.666.116,35	694.365.431.598,30	722.227.378.556,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	773.950.918.405,13	885.347.417.956,13	932.486.754.630,28	1.022.908.308.482,79	1.119.212.783.704,76	1.182.333.967.424,98	1.236.695.234.539,27
Aset Tetap Lainnya	7.107.268.697,00	6.757.161.278,84	7.067.234.878,84	7.335.604.603,84	6.179.291.232,00	5.953.764.955,00	5.951.064.955,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.503.890.038,00	17.160.130.238,00	31.576.301.840,00	8.315.532.908,00	12.518.687.622,00	7.420.864.180,00	7.945.723.924,20
Akumulasi Penyusutan	-563.224.000.827,31	-717.797.867.856,65	-774.550.525.080,42	-917.673.397.911,22	-	-	-1.273.078.813.220,55
					1.056.793.818.243,91	1.165.190.484.201,40	



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA	16.490.930.121,44	16.311.553.464,60	12.147.331.734,79	15.709.151.066,92	13.848.242.555,31	10.726.080.879,45	10.176.952.962,71
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	76.950.000,00	101.745.600,00	87.288.500,00	86.288.500,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00
Aset Tak Berwujud	1.250.930.425,00	2.110.407.620,00	2.202.029.620,00	2.457.659.620,00	4.867.340.320,00	4.893.130.320,00	5.155.820.320,00
Aset Lain-lain	22.955.183.242,44	18.646.368.587,60	11.642.764.475,44	18.431.639.351,52	16.460.439.755,83	12.250.970.696,83	15.465.616.568,83
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.898.128.045,00	-3.598.756.220,00	-4.338.051.395,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-15.719.708.446,00	-12.474.543.243,00	-9.712.325.760,65	-13.194.011.304,60	-12.508.984.375,52	-10.746.838.817,38	-14.034.007.431,12
KEWAJIBAN	2.433.292.856,34	32.372.204.896,80	21.042.797.111,97	11.415.126.454,98	24.055.688.718,23	18.957.235.851,91	16.304.782.442,56
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.433.292.856,34	32.372.204.896,80	21.042.797.111,97	11.415.126.454,98	24.055.688.718,23	18.957.235.851,91	16.304.782.442,56
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.846.483,00	44.121.796,00	36.062.841,00	27.129.453,00	26.740.718,00	516.027,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.239.442.877,34	2.235.728.022,48	2.153.302.188,45	1.794.226.354,42	1.705.268.116,01	1.681.288.484,01	2.066.425.518,66
Utang Belanja	3.426.950,00	10.978.543.446,32	8.744.574.851,52	9.175.208.320,56	10.935.132.115,22	5.272.682.563,90	7.859.998.716,90
Utang Jangka Pendek	184.576.546,00	19.113.811.632,00	10.108.857.231,00	418.562.327,00	11.388.547.769,00	12.002.748.777,00	6.378.358.207,00



Program Kerjasama LPPM UBB dengan Bappeda Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA	1.200.730.054.702,51	1.178.056.579.757,23	1.218.288.184.477,91	1.374.680.621.886,24	1.450.141.509.516,99	1.517.172.929.080,12	1.558.340.765.429,82
EKUITAS DANA LANCAR	1.200.730.054.702,51	1.178.056.579.757,23	1.218.288.184.477,91	1.374.680.621.886,24	1.450.141.509.516,99	1.480.329.384.004,09	1.552.362.741.674,20
Surplus/Defisit-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.843.545.076,03	5.978.023.755,62
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadangan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadangan Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Dana yg Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.203.163.347.558,85	1.210.428.784.654,03	1.239.330.981.589,88	1.386.095.748.341,22	1.474.197.198.235,22	1.536.130.164.932,03	1.574.645.547.872,38	

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2022



4.2.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah

4.2.6.1 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bangka Tengah dihitung berdasarkan data pendapatan daerah dari tahun 2012-2023. Secara detail rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersaji pada Tabel 4.16 berikut.

**Tabel 4.16 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023**

Tahun	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
2012	0,00
2013	8,17
2014	22,29
2015	11,82
2016	4,47
2017	-2,91
2018	14,95
2019	5,02
2020	-3,03
2021	-1,19
2022	-3,00
2023	14,00
Rata-Rata	5,88

Keterangan Tahun 2012-2021 merupakan data real dan untuk 2022-2023 adalah data proyeksi

Sumber: BPPRD Kabupaten Bangka Tengah, diolah 2022.

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, terlihat rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2012-2023 sebesar 5,88%. Angka tersebut menunjukkan tren pertumbuhan naiknya pendapatan masih tergolong rendah kurang dari 10%. Untuk pertumbuhan pendapatan negatif terjadi pada tahun 2017, 2020, 2021, 2022.

Pertumbuhan negatif tersebut terutama disebabkan karena kondisi perekonomian yang tidak stabil pada era Pandemi Covid19 sehingga tidak dapat mendongkrak Pendapatan Daerah. Untuk proyeksi tahun 2023 pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah diasumsikan akan mengalami pertumbuhan positif. Asumsi pertumbuhan pendapatan positif di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sebesar 14%. Ini didasarkan pada prioritas program pembangunan Kabupaten Bangka Tengah untuk pemulihan ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam/pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan basis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM dari sektor-sektor unggulan seperti: perikanan, pertanian, dan pariwisata.

4.2.6.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2012-2023 sebesar 9,47% atau masih kurang dari 25%. Jika disimpulkan bahwa kemandirian Kabupaten Bangka Tengah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah masih dalam kategori Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Ini berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Hal tersebut menunjukkan keuangan Pemerintah Kabupaten Tengah



cenderung sangat tergantung atau memiliki ketergantungan yang kuat dengan Pemerintah Pusat. Secara detail rasio kemandirian keuangan daerah tersaji pada Tabel 4.17 berikut.

**Tabel 4.17 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Milyar Rupiah)	Rasio Kemandirian (Milyar Rupiah)
2012	37,28	516,28	7,22%
2013	41,39	558,48	7,41%
2014	61,63	682,96	9,02%
2015	66,34	763,70	8,69%
2016	73,46	797,82	9,21%
2017	97,38	774,57	12,57%
2018	76,00	890,40	8,53%
2019	88,85	935,11	9,50%
2020	85,20	906,78	9,40%
2021	83,32	896,00	9,30%
2022	100,84	869,05	11,60%
2023	110,68	990,69	11,17%
Rata-Rata			9,47%

Keterangan Tahun 2012-2021 merupakan data real dan untuk 2022-2023 adalah data proyeksi

Sumber: BPPRD Kabupaten Bangka Tengah, diolah 2022.

4.2.6.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dari sisi rasio efektivitas, secara rata-rata pencapaian target PAD menunjukkan kategori efektif dan sangat efektif dalam mencapai target PAD, dimana rata-rata sudah melebihi 100%. Dari proyeksi realisasi dan proyeksi anggaran PAD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan 2023 diproyeksi dapat efektif dalam mencapai PAD. Secara detail rasio efektivitas keuangan daerah tersaji pada Tabel 4.18 berikut.



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Tabel 4.18 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2012-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
2012	37,28	24,91	149,66%
2013	41,39	38,29	108,10%
2014	61,63	59,49	103,60%
2015	66,34	70,21	94,49%
2016	73,46	95,72	76,74%
2017	97,38	110,99	87,74%
2018	76,00	77,7	97,81%
2019	88,85	89,55	99,22%
2020	85,2	81,09	105,07%
2021	83,32	96,33	86,49%
2022	100,84	98	102,90%
2023	110,68	100	110,68%
Rata-Rata			101,87%

Keterangan Tahun 2012-2021 merupakan data real dan untuk 2022-2023 adalah data proyeksi

Sumber: BPPRD Kabupaten Bangka Tengah, diolah 2022.

4.2.7 Peta Resiko Keuangan Daerah

Risiko fiskal adalah tekanan fiskal berkemungkinan besar terjadi pada masa yang akan datang, berbentuk suatu kemungkinan besar atau suatu potensi bahwa (1) tujuan pemerintah tidak tercapai akibat penurunan kesehatan fiskal, (2) perubahan APBD, dan (3) potensi defisit APBND akibat faktor-faktor-faktor internal dalam kendali pemerintah dan/atau faktor-faktor eksternal di luar kendali pemerintah, yang menyebabkan tambahan belanja di luar anggaran dan/atau kekurangan realisasi pendapatan.

Berkaitan dengan Kapasitas Fiskal Daerah Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 116/PMI.07/2021 menunjukkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebesar 0,599 atau dalam kategori rendah. Artinya Kabupaten Bangka memiliki kemampuan yang rendah terkait pendapatan



daerah dikurangi dengan pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Dari aspek kemandirian keuangan Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2012-2023 bahwa rata-ratanya sebesar 9,47% atau kemampuan Bangka Tengah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat masih tergolong rendah. Artinya kecenderungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap pemerintah Pusat masih tinggi. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari aspek rasionya yaitu masing-masing 11,60% dan 11,17%. Rasio ini diproyeksikan masih tergolong rendah sekali.

4.2.7.1 Peta Risiko Pendapatan Daerah

Pajak daerah memiliki kontribusi yang terbesar bagi PAD. Target pendapatan pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 74% atau Rp 45,96 milyar dari target Rp 62,04 milyar rupiah. Sedangkan Proyeksi pajak daerah tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan masing-masing sebesar Rp 62,63 milyar dan Rp 66 milyar. Mengingat capaian target pada tahun 2021 sebesar 74% dari anggaran, maka diprediksi risiko penerimaan pajak daerah juga berpotensi terhadap tidak tercapai target pada tahun 2022 dan 2023.

Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi tidak tercapainya target pajak adalah sebagai berikut.

1. Masih terdapat tunggakan pajak daerah yang tinggi terlihat dari piutang pajak daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Informasi yang didapatkan bahwasannya Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah merupakan tunggak pajak

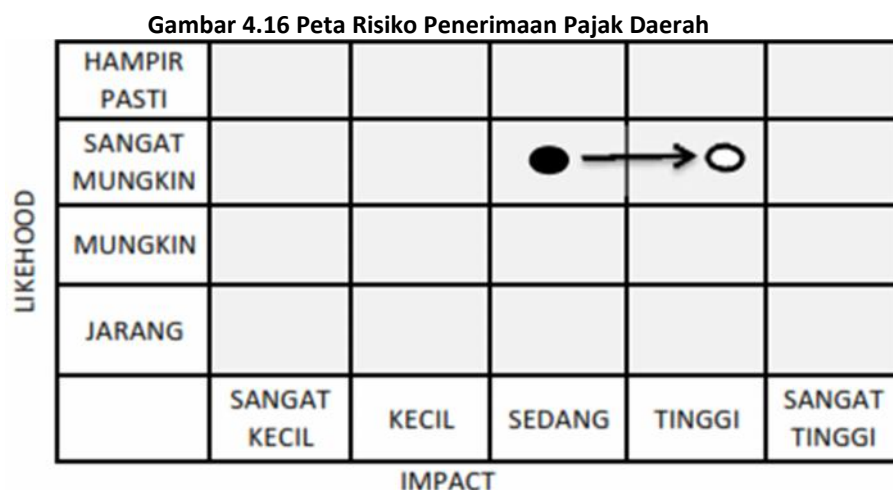
LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

yang terbesar sehingga menyebabkan piutang pajak yang bertambah.

2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih perlu ditingkatkan.
3. Struktur pajak daerah masih tergantung kepada jenis pajak tertentu.

Jika dituangkan dalam bentuk Peta risiko fiskal penerimaan pajak daerah dapat disajikan pada Gambar 4.16 berikut.



Mitigasi atas risiko penerimaan pajak daerah, meliputi:

- a. Fokus untuk kebijakan untuk dalam rangka mencapai target pajak yang menunggak. Tahapan mulai dari peningkatan kesadaran Wajib Pajak, Peran petugas pemungut untuk dalam pencapaian target dari realisasi pajak yang menunggak. Dari data yang ada menunjukkan terjadi peningkatan tunggakan pajak yakni sebesar Rp 23,01 milyar pada tahun 2021 atau meningkat 7,69% dari tahun 2020.
- b. Pemerintah perlu mengoptimalkan penerapan pertukaran informasi otomatis yang dapat mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak.

- c. Perlu dilakukan pemetaan klasifikasi dari tunggakan pajak dalam kategori lancar, kategori ragu-ragu dan kategori lancar. Sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dan data menjadi lebih akurat dalam rangka pemungutan tunggakan pajak.

4.2.7.2 Peta Risiko Belanja Daerah

Risiko belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu risiko kebijakan (*policy risk*) dan risiko penyerapan anggaran (*budget execution risk*). Secara detail dua kategori belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kebijakan mengacu kepada program Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yaitu lima program pembangunan prioritas yaitu: pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, penanggulangan kemiskinan terpadu, penurunan stunting, optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan pariwisata. Dengan adanya Program THIS Kabupaten Bangka Tengah, maka pemerintah mengalokasikan belanja sesuai dengan program dan kebutuhan. Risiko dengan pola anggaran atas kebijakan ini, kemungkinan ada risiko program THIS tersebut tidak tercapai jika adanya perubahan anggaran yang lebih memprioritaskan atas belanja tertentu, misalnya perubahan belanja daerah karena adanya *force majeure* seperti bencana alam dan wabah penyakit yang perlu penanganan lebih cepat.
- b. Risiko pelaksanaan anggaran (*budget execution risk*) terkait dengan risiko atas pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Saat realisasi pelaksanaan belanja daerah

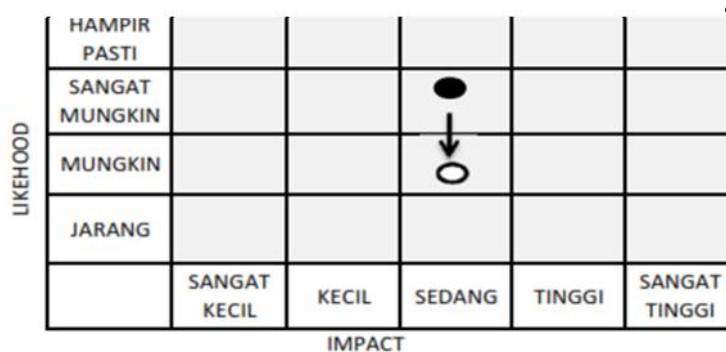
LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 sebesar 90% dari anggaran, yakni realisasi belanja daerah Rp 872,60 milyar dari anggaran Rp 961,26 milyar. Ini menunjukkan bahwa masih ada 10% dari anggaran belanja daerah tidak terserap atau sebesar Rp 88,66 milyar. Ini dapat diasumsikan mungkin ada capaian *output* maupun *outcome* program Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat terganggu.

Peta risiko fiskal belanja daerah dapat disajikan pada Gambar 4.17 berikut.

Gambar 4. 17 Peta Risiko Belanja Daerah



Mitigasi risiko belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah , meliputi:

- Kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang produktif;
- Kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target;
- Dari sisi penyerapan belanja, dilakukan penyederhanaan proses realisasi anggaran dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta menyederhanakan mekanisme pencairan anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah dapat disimpulkan dari aspek kondisi perekonomian kabupaten Bangka Tengah, arah kebijakan ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah dan aspek risiko fiskal daerah yang secara detail dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan melalui indikator-indikator sebagai berikut:
 - Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah secara umum akan positif pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 2,67% dan 3,05%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada cenderung melambat yang disebabkan base Line Pertumbuhan yang sudah tinggi pada tahun 2021 dikarenakan ekonomi bangka tengah baru saja pulih akibat Pandemi COVID 19, tingkat Inflasi yang diindikasikan meningkat pada tahun 2022 akibat dari kenaikan harga BBM dan secara trend line dalam kurun waktu 2010 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah cenderung melambat namun secara rata rata tetap positif namun fluktuasinya cukup tinggi.
 - Proyeksi tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Tengah diproyeksi akan meningkat signifikan tahun 2022 sebesar 7,70%. Kondisi ini salah satunya disebabkan adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2022. Proyeksi inflasi diprediksi akan menurun pada tahun 2023 sebesar 3,90% seiring adanya kestabilan harga-harga yang diperkirakan bahwa kondisi tersebut disebabkan adanya program pemulihan ekonomi dan

transformasi sosial diprediksi akan berimbas terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- Proyeksi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2022 sebesar 5,02% dan tahun 2023 diperkirakan menurun dengan persentase sebesar 4,86%. Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 diprediksi sebagai bentuk imbas program penanggulangan kemiskinan terpadu dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat.
 - Proyeksi tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2022 sebesar 5,28% dan tahun 2023 diperkirakan menurun dengan persentase sebesar 4,35%. Kondisi tersebut diprediksi adanya imbas program melalui bantuan usaha bagi UMKM sehingga dapat menjadi stimulus munculnya usaha-usaha baru dan diprediksi bagi penyerapan tenaga kerja.
- b. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dan 2023 diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan transformasi sosial sebagai dampak dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.
- Bentuk pemulihan pasca Pandemi COVID 19 melalui program pembangunan prioritas dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yaitu: Program Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Penurunan Stunting, Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Pariwisata. Untuk itu, kebijakan belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah mengacu terhadap lima program dalam konsep THIS tersebut
 - Bentuk pengembangan THIS dari aspek pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi inklusif sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu: sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan UMKM dan IKM serta sektor pariwisata. Bentuk

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

pengembangan tersebut diantaranya melalui: Pengembangan sarana dan prasarana, pemberian bantuan modal usaha pada, kemudahan berinvestasi.

- Bentuk pengembangan THIS dari aspek transformasi sosial melalui penanggulangan kemiskinan terpadu, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, penurunan stunting dan optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 - Proyeksi pada tiap sektor klasifikasi usaha berdasarkan ADHK tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan tiga sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah adalah: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalan; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
- c. Terkait Arah kebijakan keuangan daerah ekonomi Kabupaten Bangka Tengah untuk proyeksi tahun 2022 dan 2023 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah:
- Proyeksi keuangan daerah tahun 2023 mempertimbangkan 8 isu strategis di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu: 1) Percepatan Pemulihan Ekonomi, 2) Penanggulangan Kemiskinan, 3) Pengurangan Angka Pengangguran, 4) Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Dasar Pendukung Ekonomi, 5) Peningkatan Kualitas dan Pendidikan Masyarakat, 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah, 7) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dan 8) Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Publik.
 - Pertumbuhan pendapatan
 - Pertumbuhan belanja



5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan berkaitan dengan Kajian Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah untuk tahun 2022 dan 2023, adalah sebagai berikut:

1. Percepatan implementasi dari program prioritas Tematik, *Holistik*, Integratif dan Spasial (THIS) pada tahun 2023 dalam rangka pemulihan ekonomi yang melambat dan transformasi sosial, melalui:
 - a) Program percepatan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Bentuk pengembangan program pertumbuhan ekonomi inklusif diprioritaskan untuk sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu: sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan UMKM dan IKM serta sektor pariwisata. Bentuk pengembangan tersebut diantaranya melalui:

 - o Pengembangan Pasar Tani,
 - o Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
 - o Pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.
 - o Pemberian bantuan modal usaha pada UMKM dan IKM sehingga dapat memperluas pangsa pasar.
 - o Perlu dilakukan Pemetaan Ekonomi Masyarakat khususnya berkaitan dengan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam.
 - b) Program untuk pengembangan pariwisata, melalui Pengembangan objek wisata Danau Pading, Danau Kaolin, Air Terjun C2, Pantai Sumur Tujuh dan Pulau Ketawai.
 - c) Program pengentasan Stunting

LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

- d) Program pengentasan kemiskinan terpadu dengan kegiatan pemberian bantuan-bantuan sosial.
 - e) Program stimulus berbentuk bantuan usaha bagi UMKM / IKM dalam rangka percepatan penyerapan tenaga kerja.
 - f) Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik dan Mal Pelayanan Publik.
 - g) Program peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat melalui pengurangan angka putus sekolah, sehingga Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangka Tengah akan meningkat, yang mana Angka IPM Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 sebesar 70,89 atau peringkat 5 dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung dan masih di bawah angka nasional (72,29).
 - h) Peningkatan kompetensi tenaga kerja.
 - i) Pengembangan perikanan budidaya.
2. Perlu dilakukan suatu program dengan teknik dan inovasi tertentu dalam memaksimalkan pembayaran piutang Pajak Daerah yang tidak tertagih dari Wajib Pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2). Besarnya Potensi dari Piutang pajak PPBP2 yang tidak tertagih pada tahun 2020 sebesar Rp 19,76 Milyar dan tahun 2021 sebesar Rp 21,68 Milyar. Dari sisi secara laporan keuangan (Neraca) juga menunjukkan peningkatan jumlah piutang pajak yang selalu meningkat sejak tahun 2012-2021. Untuk itu, urgensi dari program ini tentunya menjadi prioritas untuk dipertimbangkan pada tahun 2023.
3. Kebijakan dalam belanja Program Prioritas berbasis Tematik, *Holistik*, Integratif dan Spasial (THIS) pada tahun 2023 hendaknya lebih mementingkan



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

skala prioritas dan berbasis kinerja sehingga dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dalam pengalihan belanja kepada pos-pos lain yang sifatnya *Force Majeur*.

4. Perlu dipertimbangkan untuk program peningkatan jumlah investasi pada tahun 2023 yang berlandaskan program prioritas THIS tersebut sebagai langkah awalnya.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha. 2017-2021

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. Statistik Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 2021

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka. 2021.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2011

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2020



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Tengah. 2022. Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

Firdausy, Carunia M. (Ed). 2017. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan*, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Tengah. 2011-2021. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Kuswandi, Aos. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).

Nasikun. (2001). Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *Universitas Gajah Mada*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sadono Sukirno . (2004). Makroekonomi Teori Pengantar. Raja Grafindo Persada

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). STIM YKPN.

Simanjuntak, Payaman. 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



LAPORAN AKHIR

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, 2022-2023

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur



